



RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029

Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Tapin

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam atas selesainya Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2029. Renstra ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2029, sesuai dengan tugas dan fungsi yang di emban oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pemantapan ketahanan pangan.

Diharapkan Renstra ini dapat membangkitkan motivasi dan harapan bagi seluruh aparatur daerah sekaligus sebagai pedoman perencanaan bagi aparatur Dinas Ketahanan Pangan serta seluruh stakeholder dalam upaya pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Tapin. Kritik dan saran untuk perbaikan Renstra ini sangat kami harapkan sehingga pada saatnya dapat didefinitifkan sebagai pedoman perencanaan bagi lembaga maupun daerah.

Rantau, Agustus 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan



Ryza Ramadie, SE

NIP. 19740315 200003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GRAFIK iv

DAFTAR GAMBAR..... v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Dasar Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN 9

2.1 Gambaran Pelayanan..... 9

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis 33

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 40

3.1 Tujuan dan Sasaran 40

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan 49

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN 53

BAB V PENUTUP 93

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Kinerja capaian Indikator Kinerja Utama Dinas
Ketahanan Pangan 2020 – 2024 10

Tabel 2.2 Rekapitulasi Pegawai Dinas ketahanan Pangan 18

Tabel 2.3 Daftar Pegawai ASN Menurut jenjang Pendidikan..... 19

Tabel 2.4 Pegawai DKP berdasarkan Pangkat/Golongan 20

Tabel 2.5 Kendaraan bermotor pada DKP Kab Tapin 22

Tabel 2.6 Daftar Inventaris Barang DKP 22

Tabel 2.7 Realisasi Anggaran 2020 - 2024 25

Tabel 2.8. Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Urusan Pangan 2020 –
2024..... 28

Tabel 2.9. Perkiraan Anggaran DKP Kabupaten Tapin 2025 – 2029 34

Tabel 2.10 Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran
pembangunan ketahanan pangan..... 35

Tabel 2.11 Permasalahan pembangunan Menurut Uruaan Pemerintah Tahun
2025 – 2029..... 36

Tabel 2.12 Isu Strategis Perangkat Daerah 37

Tabel 3.1Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaram Renstra Dinas
ketahanan Pangan 42

Tabel 3.2 Defenisi Operasional dari Indikator Kinerja Utama Renstra Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2029..... 44

Tabel 3.3 Penahapan Renstra Perangkat Daerah 49

Tabel 3.4 Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Tapin 50

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Perangkat Daerah 58

Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan pendanaan..... 74

Tabel 4.3 Daftar SubKegiatan Prioritas dan Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah 84

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 91

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci..... 92

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Pria dan Wanita Dinas Ketahanan Pangan 19

Grafik 1.2 Komposisi Jenjang Pendidikan PNSi Dinas Ketahanan Pangan 20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin 17

Gambar 2.2 Gedung Dinas Ketahanan Pangan..... 21

Gambar 2.3 SOP Pengukuran Kinerja Dinas ketahanan Pangan 26

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal, dengan berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan.

Amanat regulasi renstra (Rencana Strategis) berasal dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap satuan kerja untuk menyusun renstra sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dan memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Nilai strategis renstra (rencana strategis) terletak pada kemampuannya untuk memberikan arah dan kerangka kerja bagi organisasi dalam mencapai tujuan jangka panjang. Renstra membantu organisasi berpikir secara strategis, membuat keputusan yang lebih baik, dan mengalokasikan sumber daya secara efektif.

Berbagai peraturan dan perundangan yang ditetapkan oleh Pemerintah juga telah mengarahkan dan mendorong pementapan ketahanan pangan yaitu: Undang – undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada Pasal 2 dan Pasal 3, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membuat laporan mempertanggungjawabkan urusan ketahanan pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan dan strategis organisasi serta rencana program kegiatan indikatif kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin merupakan perangkat dokumen yang bertujuan untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan ketahanan pangan dan sumberdaya manusia pertanian kurun waktu 5 (lima) tahun secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan kebijakan RPJMD Kabupaten Tapin. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2029 merupakan acuan, arahan kebijakan dan strategi pembangunan ketahanan pangan dan SDM pertanian dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025 – 2029.

Nilai regulasi dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan adalah penting untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Regulasi ini menjadi dasar hukum dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan pangan, serta memastikan tercapainya tujuan pembangunan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan subsistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta peningkatan kualitas konsumsi dan kemaanan pangan. Dengan demikian program – program pembangunan ketahanan pangan dan pertanian tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial - ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan masyarakat dan kesejahteraan petani dan berkelanjutan

Regulasi dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan memiliki beberapa manfaat, antara lain: Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam, berkualitas, dan aman untuk dikonsumsi. Memastikan aksesibilitas pangan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Meningkatkan pemanfaatan pangan yang optimal untuk memenuhi kebutuhan gizi Masyarakat, dan Menciptakan stabilitas pasokan pangan untuk mencegah fluktuasi harga dan ketersediaan pangan

2. Dasar Hukum

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2029 disusun berdasarkan peraturan perundang – undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong. Dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang – undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan.
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6757).

7. Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
8. Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 – 3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 18. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 19. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.
 20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/PERMENTAN/KN.130/8/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
 22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
 23. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 – 2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6).
 25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2045 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

Nomor 04).

26. Peraturan Bupati Tapin No 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten apin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
28. Peraturan daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 tahun 2022 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 05)
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 09);
30. Perda Nomor 3 Tahun 2025 Lembaran Daerah Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 142 Tanggal 14 Agustus 2025 Tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03) Tanggal 20 Agustus 2025

3. Maksud dan tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai arah kebijakan dan program dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Tapin selama 5 (lima) tahun kedepan.
- b. Sebagai penjabaran implementatif dari RPJMD pada bidang ketahanan pangan di Kabupaten Tapin
- c. Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada Dinas Ketahanan Pangan dalam menyusun rencana kerja tahunan

Adapun Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

- a. Membantu seluruh jajaran petugas/aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin dalam mencapai tujuan dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan bidang ketahanan pangan di Kabupaten Tapin.
- b. Memudahkan bagi para pemangku kepentingan pembangunan ketahanan pangan dalam memahami dan mensinergiskan dengan arah kebijakan dan program prioritas serta kegiatan operasional tahunan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin
- c. Mengarahkan pembangunan bidang ketahanan pangan di Kabupaten Tapin pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan.

4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin tahun 2025 – 2029 ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum Penyusunan
3. Maksud dan Tujuan

4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN

1. Subbab Gambaran pelayanan perangkat daerah
2. subbab Permasalahan dan isu strategis perangkat daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan
2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan
3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

1. Uraian Program
2. Uraian Kegiatan
3. Uraian Subkegiatan
4. Target Keberhasilan Pencapaian tujuan dan sasaran renstra melalui indikator kinerja utama (IKU)
5. Target kinerja penyelenggaraan melalui indikator kinerja kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASLAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN

2.1. Gambaran Pelayanan

Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten tapin sesuai dengan tugas dan fungsi pokok adalah membantu kepala daerah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan. Sumberdaya Manusia terkait kinerja untuk mencapai tujuan sasaran harus dikelola dengan baik dan benar agar tidak menjadi masalah besar bagi organisasi terutama penurunan kinerja dan produktivitas kerja. Hasil Evaluasi Capaian Kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin dapat dilihat berdasarkan sasaran menurut Indikator Kinerja Utama tahun 2020 – 2024. Adapun dapat dilihat:

Tabel 2.1. Hasil Evaluasi Kinerja Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas dan Indikator Kinerja Kunci ketahanan Pangan 2020 - 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN																Tingkat Capaian Target RPJMD Tahun Berjalan dengan target Akhir Tahun Perencanaan				Target akhir periode RPJMD	
			2020				2021				2022				2023									
			Targ et	Real isasi	Cap aian	Predik at	Target	Realis asi	Capai an	Predik at	Target	Realis asi	Capai an	Predik at	Targ et	Real isasi	Cap aian	Predik at	Target	Realis asi	Capai an	Predikat		
Indikator Kinerja Utama																								
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	100	84,5	85	Tinggi	100	84,6	85	Tinggi	100	83,6	84	Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	68	89,9	132	Sanga t Tinggi	87	88,4	102	Sanga t Tinggi	88	86,2	98	Sanga t Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Ton	10	15	150	Sanga t Tinggi	10	10	100	Sanga t Tinggi	10	0	0	Sanga t Renda h	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Persentase Skor Sampel Pangan Segar Yang Lulus Uji	Persen	100	100	100	Sanga t Tinggi	100	100	100	Sanga t Tinggi	100	100	100	Sanga t Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Kecama tan	2	2	100	Sanga t Tinggi	2	2	100	Sanga t Tinggi	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		

6	Desa Bebas Rawan Pangan	Desa	-	-	-		-	-	-	-	2	2	100	Sangat Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	90,1	100	Sangat Tinggi	90	93,21	104	Sangat Tinggi	93
8	Persentase bahan pangan yang aman beredar di masyarakat	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		100	100	100	Sangat Tinggi	100
9	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	72,2	90	Sangat Tinggi	80	81,95	102	Sangat Tinggi	88
10	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	29,7	41	Rendah	73	78	107	Sangat Tinggi	85
Indikator Kinerja Kunci																							
1.	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/Jagung Sesuai Kebutuhan)	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	1,89 Ton*)	1,89 Ton*)	100	Sangat Tinggi	0,74*)	0,74*)	100 %	Sangat Tinggi	0,55	0,55	100%	Sangat Tinggi	0,60

Keterangan : *) : Adanya Pergantian Rumus perhitungan pada Tahun 2022 – 2024 sehingga perhitungan berbeda

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi tentunya tidak lepas dari dukungan sarana dan prasarana yang dimilikinya. Dasar hukum pembentukan SKPD Dinas Ketahanan Pangan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin. Dinas Ketahanan Pangan memiliki tugas pokok membantu Bupati Tapin dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut

1. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan.
2. Penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan meliputi kesekretariatan, ketersediaan dan kewaspadaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan, serta kelembagaan dan infrastruktur.
3. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan sesuai lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Nilai-nilai organisasi yang diterapkan dalam Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin adalah Integritas, Transparan, Efisien dan Efektif serta Berkualitas. Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan. Peraturan Bupati Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan No. 24 Tahun 2017.

A. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dasar hukum pembentukan SKPD Dinas Ketahanan Pangan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin. Dinas Ketahanan Pangan memiliki tugas pokok membantu Bupati Tapin dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin Mempunyai fungsi Sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- d. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- e. Pemantauan, Pengawasan, Evaluasi dan pelaporan penyelenggara teknis bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
- g. Pengelola Kegiatan kesekretariatan.
- h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan ioleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi dan masing-masing tugas unsur pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin sebagai berikut:

1. Kepala

Kepala Dinas Ketahanan Pangan merupakan koordinator utama dalam proses perencanaan pembangunan yang memiliki tugas untuk memastikan

semua aktivitas terkait bidang ketahanan pangan berjalan secara efektif dan efisien.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum, asset dan administrasi kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas kesekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas.
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan.
- d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan asset Dinas.
- e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga.
- f. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian.
- g. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat.

Sekretariat terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, penatausahaan keuangan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan.

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan asset,

hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.

3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Bidang ketersediaan dan distribusi pangan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan. Untuk melaksanakan tugasnya bidang ketersediaan dan distribusi pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian ketersediaan pangan.
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian distribusi pangan.
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian kerawanan pangan.
- d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian infrastruktur pangan.
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- h. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervise dan pemantauan ketersediaan pangan, infrastruktur pangan dan sumberdaya ketahanan pangan lainnya, pemantauan distribusi dan harga pangan dan pemantauan kerawanan pangan.

4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

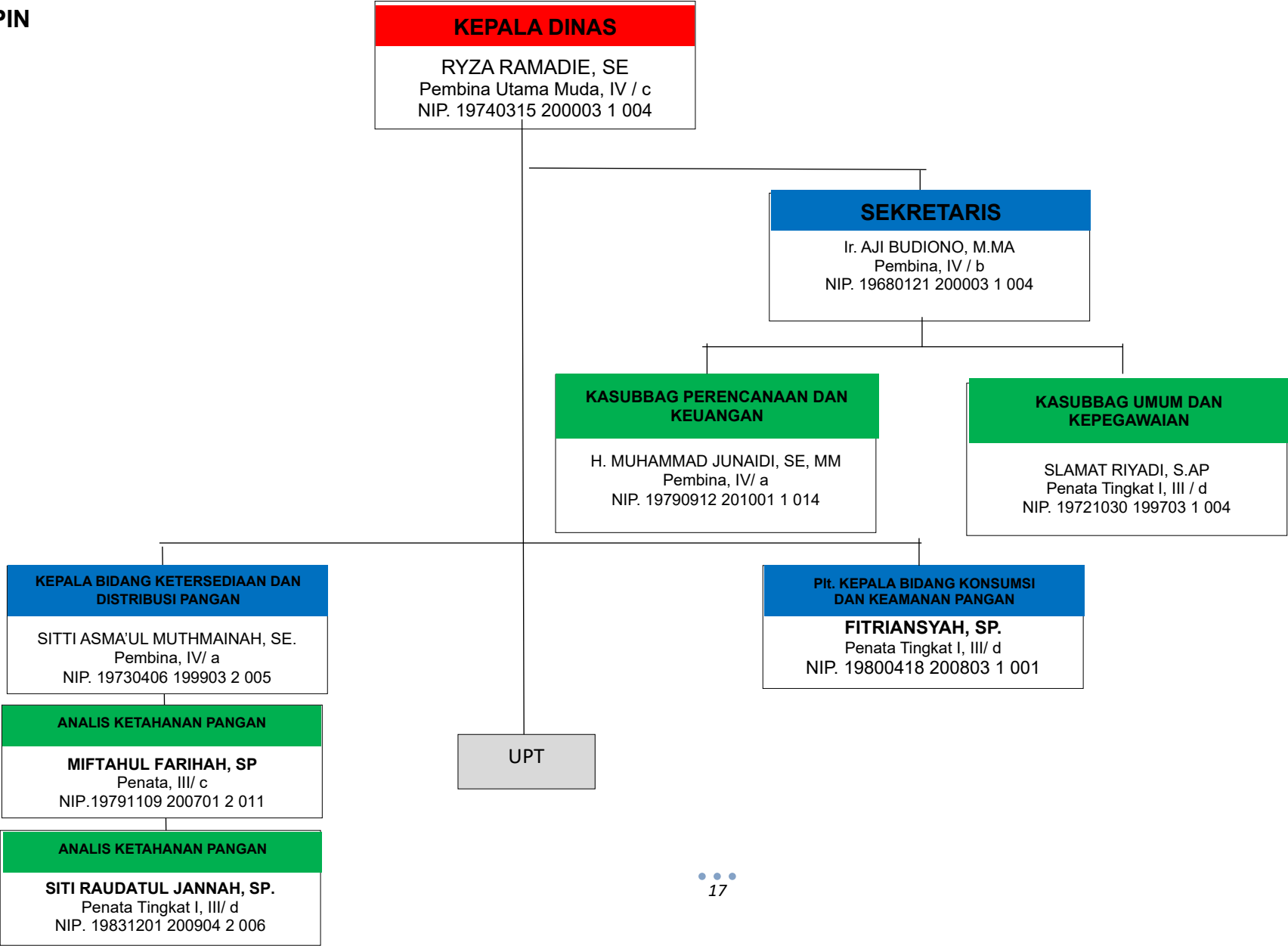
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan konsumsi dan keamanan pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan

pangan. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian konsumsi pangan.
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penganeekaragaman konsumsi pangan.
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian keamanan pangan.
- d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan pangan local.
- e. Penyiapan pemantapan program dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan.
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan.
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- h. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervise dan pemantauan konsumsi pangan, pemantauan penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal dan pemantauan keamanan pangan.

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TAPIN**

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin



2.1.2. Sumberdaya Dinas Ketahanan Pangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sumberdaya yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin terdapat berbagai tingkat pendidikan yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan golongan dalam rangka menunjang kinerja agar mencapai target kinerja yang telah ditentukan dalam RPJMD 2025 - 2029. Berikut merupakan rincian sumberdaya yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan.

1. Sumberdaya Manusia

Berikut ini jumlah ASN yang dimiliki DKP Kabupaten Tapin beserta jabatannya antara lain :

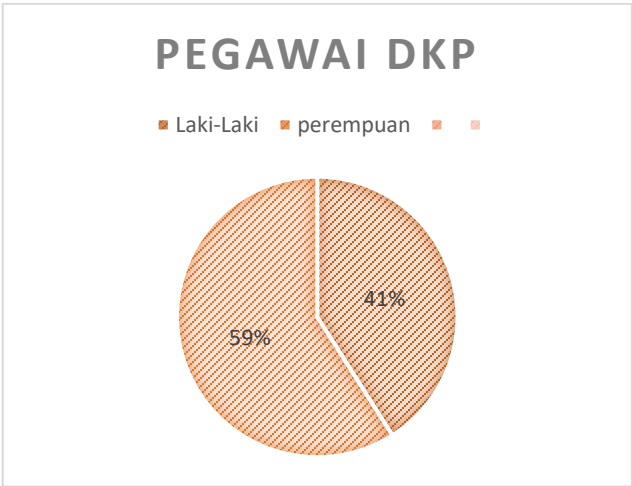
Tabel 2.2. Rekapitulasi Pegawai Dlnas Ketahanan Pangan

No	Unit Kerja	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Kepala DKP	1
2	Sekretariat DKP	9
3	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	7
4	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	5
	Jumlah Total	22

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab.Tapin 2025

Berdasarkan jenis kelamin pada Tahun 2025, jumlah pegawai pria yang bekerja sebagai ASN di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin adalah sebanyak 9 orang (41%), dan jumlah pegawai wanita tercatat sebanyak 12 orang (59%).

Dengan demikian jumlah pegawai wanita di DKP Kabupaten Tapin telah memenuhi komposisi anjuran pemerintah sebesar 20% dari jumlah keseluruhan pegawai.



Grafik 2.1 Komposisi Pegawai Pria dan Wanita Dinas Ketahanan Pangan

Berikut ini disajikan ASN kepegawaian DKP Kabupaten Tapin berdasarkan jenjang pendidikan yaitu :

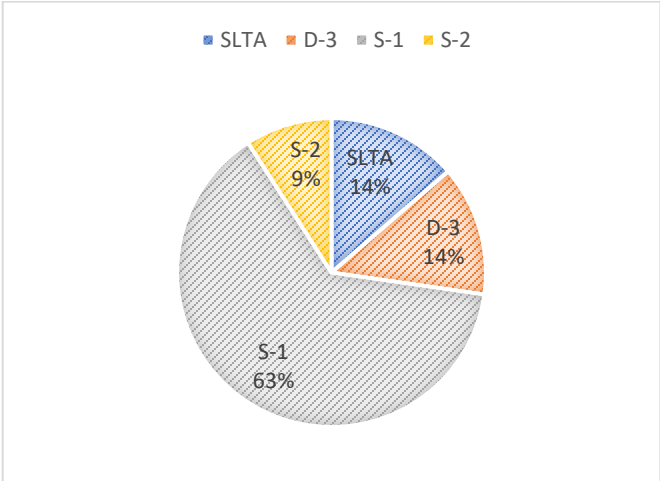
Tabel 2.3 Daftar Pegawai ASN Menurut Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	SD	-
2	SLTP	-
3	SLTA	3
4	D3	3
5	S1	14
6	S2	2
7	S3	-
	Jumlah Total	22

Sumber: Dinas ketahanan Pangan 2025

Berdasarkan Tingkat Pendidikan terakhir yang berhasil diselesaikan, pegawai DKP Kabupaten Tapin lebih didominasi (63%) oleh pegawai dengan tingkat pendidikan S-1 (Sarjana), Pendidikan S-2 sebesar 9% Pendidikan D-3 sebesar 14%, dan Pendidikan SLTA sebesar 14%. Dari komposisi ini dapat dilihat bahwa pegawai DKP yang berpendidikan S-1 cukup banyak, Namun demikian,

jumlah pegawai masih kurang dan belum cukup memadai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Total aparatur di Dinas Ketahanan Pangan meliputi pegawai struktural sebanyak 22 orang.



Grafik 2.2 Komposisi Jenjang Pendidikan PNS Dinas Ketahanan Pangan

Membantu memaksimalkan terlaksananya tugas di masing - masing bagian bidang. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin mengontrak Tenaga Bantu berjumlah 11 (lima belas) orang yang terdiri dari 6 (enam) orang di unit kerja bidang sekretariat, 3 (tiga) orang di bidang ketersediaan dan distribusi pangan dan 2 (dua) orang di bidang Konsumsi dan keamanan pangan.

Berikut ini disajikan Golongan/Pangkat ASN Kepegawaian DKP Kabupaten Tapin yaitu :

Tabel 2.4 Pegawai DKP Berdasarkan Pangkat/Golongan.

Golongan / Pangkat PNS	A	B	C	D	Jumlah
IV	2	1	1	-	2
III	1	5	1	3	12
II	-	-	1	2	2
I	-	-	-	-	-
Jumlah PNS					17

Golongan / Pangkat PPPK	MAHIR	Jumlah
IX	4	4
V	1	1
Jumlah PPPK		5
Jumlah Total		22

Sumber: Dinas ketahanan Pangan 2025

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin memiliki susunan kepegawaian: (a) Kepala Dinas; (b) Sekretaris; (c) Kepala Bidang; (d) Kepala Sub bagian/ Kepala Sub Bidang; (e) Staf; dan (f) Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sumberdaya Sarana dan Prasarana

a. Gedung Kantor

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi tentunya tidak lepas dari dukungan sarana dan prasarana yang dimilikinya. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh terutama gedung kantor yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No.88, Rantau Kiwa dan sarana lainnya yang berasal dari pembiayaan APBD Kabupaten Tapin.



Gambar 2. Gedung Dinas Ketahanan Pangan

b. Kendaraan Bermotor

Untuk Penunjang Operasional para petugas, Dinas Ketahanan Pangan memiliki kendaraan bermotor sebanyak 2 buah roda 4 dan 58 roda 2. Adapun rincian kendaraan bermotor dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5 Kendaraan Bermotor pada DKP Kab.Tapin

No	Kendaraan	Merek	Jumlah (Unit)	Tahun
1	Mobil	Inova Toyata	1	2017
		Toyata Hilux	1	2016
2	Sepeda Motor		58	2006,2013, 2014

c. Aset Lainnya

Disamping sumberdaya manusia, sarana dan prasarana Dinas ketahanan pangan memiliki daftar inventaris barang sampai dengan tahun 2022. Dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6. Daftar Inventaris Barang DKP

No	Peralatan	Jumlah	Keterangan
1.	Meja Kerja	9	
2.	Kursi Kerja	6	
3.	Lemari Buku Arsip	3	
4.	Kursi Rapat	2	
5.	Rak	1	
6.	Lemari Kayu	1	
7.	Kipas Angin	1	
8.	Alat Rumah Tangga	2	

9.	White Board	2	
10.	Kulkas	1	
11.	AC	9	
12.	TV	4	
13.	PC	6	
14.	Notebook	18	
15.	Lemari Besi	8	
16	Brandkas	2	
17	Meja Rapat	3	
18	Kursi Rapat	3	
19	Camera Video	3	
20	Dispenser	1	
21	Handycam	1	
22	Laptop	8	
23	Printer	19	
24	Papan Visual	1	
25	Sound System	1	
26	Portable Generating set	1	
27	Lemari Kaca	1	
28	Kursi Tamu	1	
29	Meja Tamu	1	
30	Stabilizer	6	
31	Uninterruptible power suply	2	
32	Hard Disk	2	

3. Anggaran

Proses pelaksanaan anggaran, yaitu penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan. Laporan realisasi anggaran, menyajikan informasi perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan Realisasi Anggaran untuk lebih menunjang keberhasilan kinerja Dinas Ketahanan Pangan mengambil beberapa langkah, diantaranya. Selama tahun 2020 – 2024 pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin mendapatkan anggaran. besarnya anggaran yang di kelola Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2024 yang berasal dari dana APBD.

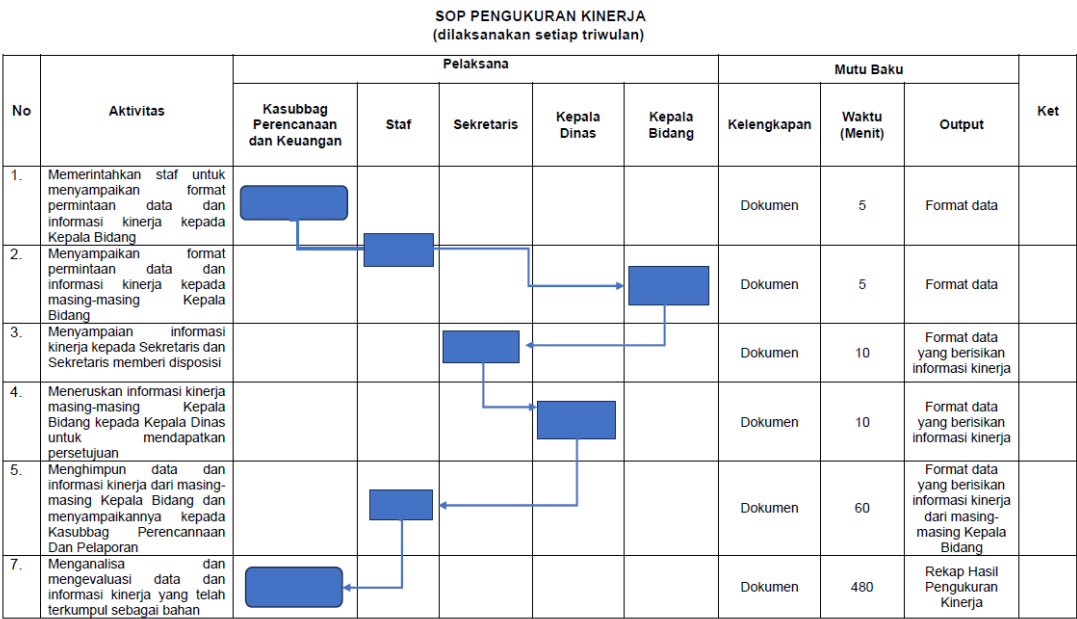
Penyerapan anggaran juga dapat dikatakan baik karena hampir semua realisasi anggaran lebih dari 90% dan tidak ada yang melebihi anggaran yang sudah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan. Realisasi Anggaran 2020 – 2024 Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7. Realisasi Anggaran 2020 – 2024

NO	URAIAN BELANJA	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1	Belanja Pegawai	2.001.629.927	1.539.776.153	461.853.774	2.057.507.238	2.007.540.539	49.966.699	2.451.122.963	2.138.925.029	312.197.934	2.385.310.441	2.197.838.169	187.472.272	2.507.048.681	2.390.529.349	116.519.332
2	Belanja Barang Jasa	1.826.700.624	1.615.450.112	211.250.512	4.540.901.047	4.414.068.418	126.832.629	8.425.208.411	7.819.392.188	605.816.223	4.096.649.893	3.825.768.949	270.880.944	4.666.057.034	4.072.114.231	593.942.803
3	Belanja Modal	693.774.000	693.774.000	0	63.023.300	63.023.300	0	66.729.300	65.579.000	1.150.300	55.784.532	54.540.000	1.244.532	109.839.300	98.100.000	11.739.300

5. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur adalah dokumen yang berisi panduan langkah demi langkah untuk melaksanakan tugas atau aktivitas rutin. SOP memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan cara yang sama setiap kali, sehingga menjaga standar operasional dan kepatuhan terhadap peraturan atau kebijakan yang berlaku. Dinas Ketahanan Pangan memiliki beberapa SOP salah satunya adalah SOP pembuatan Renstra.



Gambar 2.3 SOP Pengukuran Kinerja Dinas Ketahanan Pangan

6. Inovasi

Inovasi adalah proses menciptakan atau memperkenalkan sesuatu yang baru dan berbeda, baik itu ide, produk, metode, atau proses. Inovasi bertujuan untuk memberikan solusi atas suatu masalah, meningkatkan efisiensi, atau menciptakan nilai tambah. Dinas Ketahanan Pangan Memiliki 2 Inovasi dari esellon 3 yaitu inovasi SILAHAP (Sistem Pelaporan Harga Pangan) dari Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan yang saat ini dalam proses penerapan inovasi melalui sistem informasi pada web dinas ketahanan pangan dan penayangan Harga pangan yang bekerjasama dengan Stasiun TV daerah (TapinTV) dan MAS_DKP merupakan aplikasi yang berguna untuk mengarsipkan asset-aset pada instansi daerah dari Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan namun inovasi tersebut tahapannya masih dalam tahapan inisiatif.

7. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sumberdaya Manusia terkait kinerja untuk mencapai tujuan sasaran harus dikelola dengan baik dan benar agar tidak menjadi masalah besar bagi organisasi terutama penurunan kinerja dan produktivitas kerja. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten tapin sesuai dengan tugas dan fungsi pokok adalah membantu kepala daerah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan. Dapat disimpulkan Bahwa kinerja DKP Kabupaten Tapin Secara Umum sudah cukup memuaskan. Kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin dapat dilihat pada Pembagian Urusan Pemerintah Urusan Bidang Pangan Tahun 2020 – 2024 pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8. Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Urusan Pangan 2020 - 2024

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA	KINRJA UTAMA	INDKATOR	SATUAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023				TAHUN 2024			
						Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Predikat	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia	Unit	-	-	-	1	1	100	2	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Peningkatan Diversifikasi Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	100	84,5	84,5	100	84,6	84,6	100	83,6	83,6								
		b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota	Meningkatnya Ketahanan Pangan Melalui Distribusi Pangan	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Ton	10	15	150	10	10	100	10	0	0								

		d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.	Peningkatan Diversifikasi Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	68	89,90	132	87	88,40	102	88	86,2	97,95								
		c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.	Meningkatkan Kualitas Ketahanan dan Keamanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	90,1	100,1	Sangat Tinggi	90	93,21	104	Sangat Tinggi
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penanganan Kerawanan Pangan	a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Melalui Distribusi Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Kecamatan	2	2	100	2	2	100	2	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	Meningkatkan Kualitas Ketahanan dan Keamanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	90,1	100,1	Sangat Tinggi	90	93,21	104	Sangat Tinggi

		c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.	Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Skor Sampel Pangan Segar Yang Lulus Uji	Perse ntase	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
			Meningkatkan Kualitas Ketahanan dan Keamanan Pangan Daerah	Persentase bahan pangan yang aman beredar di masyarakat	Perse ntase	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	Sanga t Tinggi	100	100	100	San gat Ting gi

8. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Hampir seluruh kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin di tingkat lapangan dilaksanakan melibatkan partisipasi aktif stakeholders, baik stakeholders penerima manfaat yang umumnya adalah kelompok-kelompok masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha dibidang pertanian.

Stakeholders tersebut umumnya sudah berbentuk kelembagaan. Beberapa kelembagaan pada kegiatan ketahanan pangan diantaranya:

- Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
- Lumbung Pangan
- Kelompok Affinitas pada Desa Mandiri Pangan (Demapan)

9. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan merujuk pada kerjasama antara Perangkat Daerah dengan pihak lain, baik itu instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat, dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Mitra Dinas Ketahanan Pangan berperan penting dalam memberikan layanan terkait ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan. Mereka bekerja sama dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak untuk menjaga pasokan, harga, dan kualitas pangan bagi masyarakat. Dinas Ketahanan Pangan bersama mitra mengadakan gerakan pangan murah untuk menjual komoditas pangan dengan harga terjangkau dan mitra menyediakan informasi harga pangan dan stok pangan untuk membantu masyarakat dalam membuat keputusan pembelian.

10. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berperan penting dalam pencapaian kinerja perangkat daerah. BUMD dapat memberikan kontribusi signifikan melalui peningkatan pendapatan daerah, penyediaan barang dan jasa, serta pengembangan potensi ekonomi lokal. Selain itu, BUMD juga dapat menjadi agen pembangunan daerah dengan terlibat dalam berbagai program

strategis pemerintah daerah. Dinas Ketahanan Pangan dapat mencapai kinerjanya dengan dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terutama BUMD Pangan. BUMD dapat berperan dalam penyediaan pangan, stabilisasi harga, dan distribusi pangan, serta pengembangan usaha pangan masyarakat. BUMD dapat terlibat dalam berbagai program ketahanan pangan yang dijalankan oleh pemerintah daerah, seperti penyediaan pangan bersubsidi, bantuan pangan, atau pasar murah dan juga Dinas Ketahanan pangan Bekerja Sama Dengan BUMD (Tapin TV) dalam membantu penyiaran terkait penayangan informasi harga pangan.

11. Kerjasama yang Menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah

Tanggung jawab kerjasama perangkat daerah mencakup berbagai bidang, termasuk kerjasama antar daerah, kerjasama dengan pihak ketiga, dan kerjasama dalam internal perangkat daerah itu sendiri. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, efisiensi, dan kesejahteraan Masyarakat. Beberapa Kerjasama yang menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan

- **Pengembangan Pangan Lokal:**

Dinas mendorong pengembangan pangan lokal sebagai alternatif pangan strategis. Kerjasama dilakukan dengan petani, kelompok tani, dan pelaku usaha pangan lokal untuk meningkatkan produksi, pengolahan, dan pemasaran pangan lokal.

- **Keamanan dan Mutu Pangan:**

Dinas menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan keamanan dan mutu pangan yang beredar di masyarakat. Ini mencakup kerjasama dalam pengawasan mutu pangan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai keamanan pangan.

- **Penanganan Kerawanan Pangan:**

Dinas bertanggung jawab dalam penanganan kerawanan pangan yang mungkin terjadi di daerah. Kerjasama dilakukan dengan berbagai pihak

untuk mengidentifikasi daerah rawan pangan, memberikan bantuan pangan, serta melakukan upaya pencegahan terjadinya kerawanan pangan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

A. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

1). Peluang (Opportunity)

- Adanya teknologi yang selalu berkembang
- Trend perubahan perilaku masyarakat konsumen terhadap produk olahan pangan
- Pangsa pasar yang semakin terbuka, terutama pasar domestik; makin meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk pangan olahan yang beraneka, sehat, bergizi, dan berkualitas.
- Potensi diversifikasi bahan pangan

2). Tantangan (Threat)

- Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi
- Berlangsungnya perubahan iklim
- Masuknya produk pangan dari luar dan tingginya tingkat persaingan usaha.
- Fluktuasi harga pangan.
- Tingginya alih fungsi lahan dan menurunnya kualitas lahan produktif.
- Masih terbatasnya konsumsi pangan berimbang, beragam dan bergizi.

Semua potensi yang dimiliki harus dapat dimaksimalkan dan digunakan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan bahwa aktifitas bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin dan berkontribusi pada pencapaian kinerja utama pemerintah daerah kabupaten tapin. Untuk menghadapi tantangan dan menyelenggaraan pelayanan tersebut, perkiraan besaran kebutuhan pendanaan untuk periode 2025 – 2029,

dapat dilihat dalam tabel perkiraan anggaran belanja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin 2025 - 2029 di bawah ini.

Tabel 2.9 Perkiraan Anggaran DKP Kabupaten Tapin 2025 – 2029

Tahun	Anggaran
2025	Rp. 7.195.648.603
2026	Rp. 8.555.431.033
2027	Rp. 8.983.202.585
2028	Rp. 9.432.362.714
2029	Rp. 9.903.980.850

B. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Sebagai instansi pelaksana urusan pemerintah bidang pangan, dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin dipengaruhi oleh Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana urusan penunjang dibidang Ketahanan Pangan. Dinas Ketahanan Pangan juga memiliki berbagai masalah yang sudah diidentifikasi dan memerlukan penanganan secara optimal.

Berbagai yang dihadapi dalam pembangunan bidang ketahanan pangan di Kabupaten Tapin antara lain:

- 1. Pengisian Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Kabupaten.
- 2. Adopsi Informasi olahan pangan nonberas dan terigu.

3. Masih terbatasnya lumbung pangan di sentra produksi.
4. Kesadaran masyarakat akan pangan segar yang terbebas dari bahan kimia dan berbahaya.

Adapun analisis permasalahan pembangunan ketahanan pangan juga dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.10. Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan ketahanan pangan

No	Masalah Pokok	Analisis	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengisian Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Kabupaten	Rendahnya Pengisian CPP disebabkan Stabilitas dan Kontinuitas Ketersedian	Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat yang Masih belum Maksimal
2	Adopsi Informasi Olahan Pangan Nonberas dan terigu	Masyarakat belum memahami informasi konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	SDM yang masih rendah dalam mengadopsi informasi konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) dan mengekspose sertaa mempromosikan pangan Lokal
3	Masih Terbatasnya lumbung pangan di sentra produksi	Kelembagaan ketersediaan pangan yang kompeten berbasis menejemen modern	Kurangnya kemampuan/ pengetahuan masyarakat dalam mengelola lumbung pangan berorientasi bisnis

bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan. Berdasarkan Teknik menyimpulkan isu strategis perangkat daerah dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.12. Isu Strategis Perangkat daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relavan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relavan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Produksi Pangan yang Berlimpah	Belum Optimalnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman	Ketahanan Pangan Terhadap dampak bencana dan Perubahan Iklim	1. Menjamin Akses bagi semua orang terhadap makanan yang beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman 2. Malnutrisi 3. Menjamin fungsi pasar dan memfasilitasi akses dan informasi harga pangan	Pembangunan yang dimulai dari desa dengan tujuan pemerataan ekonomi dan percepatan pengentasan kemiskinan	1. Ketersediaan pangan dan kemandirian masyarakat dalam usaha menurunkan tingkat kerawanan pangan belum maksimal 2. Sistem jaringan distribusi pangan belum efisien dan stabil dalam menjaga stabilitasi harga pangan serta cadangan pangan minimal 3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan 4. Rendahnya Diversifikasi Pangan 5. Digitalisasi distribusi pangan	1.Sistem Jaringan Distribusi dan Akses Pangan 2.Penganekaragaman Konsumsi pangan 3.Kesadaran Masyarakat terhadap keamanan Pangan segar 4.Kerawanan pangan
	Belum Optimalnya Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan					

Pada bagian ini akan dipaparkan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin yang menjadi fokus di periode 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

a. Sistem jaringan distribusi dan Akses Pangan

Isu sistem distribusi yang efisien diperlukan dalam perumusan kebijakan terkait distribusi pangan. Kebijakan tersebut antara lain perlu

dilakukan ketika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga dan gangguan akses pangan. Stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat. Ketidaklancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

Isu cadangan pangan sangat penting untuk ditangani. Adanya tantangan iklim ekstrim memicu terjadinya bencana dan pergeseran masa tanam yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan

b. Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan, serta kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas dan kecenderungan reduksi proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat salah satunya dilaksanakan dengan menggencarkan promosi pangan lokal.

c. Kesadaran Masyarakat Terhadap keamanan pangan segar

Kondisi keamanan pangan di Kabupaten Tapin ditandai dengan masih terjadinya berbagai kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran biologi, fisik, dan penggunaan pengawet kimia yang tidak memperhatikan food grade yang berlebihan serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat.. Dari hasil

pemantauan, diketahui terjadinya permasalahan keamanan pangan diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan produsen dalam praktek penanganan pangan yang aman, belum optimalnya kontrol peredaran bahan berbahaya untuk pangan dan Penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan keamanan pangan secara tegas.

d. Kerawanan Pangan

Potensi kerawanan pangan di Kabupaten tapin penanganannya sudah mulai membaik di beberapa desa. Kerawanan Pangan diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan daerah dalam Upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dan cadangan pangan pemerintah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Ketahanan Pangan merupakan upaya untuk mengatasi perubahan, baik perubahan dari eksternal daerah maupun internal daerah. Dinamika dan perubahan menjadi banyak ragamnya saat ini, terlebih setelah masa gempuran teknologi yang dialami oleh masyarakat. Perubahan-perubahan dinamika tersebut tentu memaksa masyarakat untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri untuk meningkatkan kualitas hidup.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin imbasnya yaitu dengan mewujudkan kedaulatan pangan masyarakat melalui ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi, serta keamanan pangan, dengan berbasis bahan baku, sumber daya, dan kearifan lokal. Hal ini menggunakan dasar argumentatif bahwa peran dan tanggung jawab pemerintah muncul manakala masyarakat secara alamiah belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya atau untuk tujuan sosial yang lebih luas. Fungsi pemerintah daerah bagi ketahanan pangan ditunjukkan dengan untuk Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan di wilayahnya. Fungsi utamanya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan terkait ketahanan pangan, termasuk ketersediaan, akses, serta konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA).

Tujuan merupakan untuk mengarahkan dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi dalam kurun waktu tertentu. Tujuan tentunya selaras dengan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2029 yang mana Dinas Ketahanan Pangan mendukung Misi 1 Tujuan 1 pemerintah Daerah Yaitu Meningkatnya Daya Saing Sumberdaya Manusia yang Unggul. Dan Misi 5 Tujuan 1 Pemerintah Daerah yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Inovatif dan Berintegritas. Perumusan tujuan diharapkan dapat

menggambarkan hasil yang di capai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sehingga mampu mengantisipasi perubahan, perkembangan, guna memberikan hasil tujuan pembangunan khususnya dalam peningkatan dan pemantapan pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Tapin. Maka Tujuan yang mendukung Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin yang mendukung RPJMD Kabupaten Tapin dirumuskan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah Yang menunjang Kesejahteraan Masyarakat dengan Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Pangan. Outcome yang dihasilkan dimana kondisi seluruh masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi, serta memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangannya secara berkelanjutan. Ketahanan pangan yang baik berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai cara, termasuk pengurangan kemiskinan, peningkatan kesehatan, dan stabilitas sosial. #
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP. Outcome yang dihasilkan mampu memastikan penggunaan sumber daya yang efektif dan mendorong kinerja profesional,

Sedangkan Sasaran strategis (Renstra) adalah hasil spesifik dan terukur yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, biasanya lima tahun, untuk mewujudkan tujuan yang lebih besar. Sasaran ini menjadi target yang jelas dan terarah untuk seluruh kegiatan dan program yang akan dilaksanakan dalam periode Renstra tersebut. Maka Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin dirumuskan sebagai berikut

1. Meningkatkan Kualitas Ketahanan dan Keamanan Pangan Pangan daerah
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
3. Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat daerah.

Adapun tabel Tujuan/sasaran Dinas Ketahanan Pangan dengan target tahun 2025 – 2030, sebagai berikut:

Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan

NPSK dan Sasaran RPJMD yang relavan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Menurunnya kemiskinan dan Ketimpangan	Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah		Indeks Ketahanan Pangan	89,06	89,54	90,02	90,5	90,98	91,46	
	Yang menunjang Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Ketahanan dan Keamanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan	93	93	94	94	95	96	
			Persentase Bahan Pangan yang aman	100	100	100	100	100	100	

			beredar di Masyarakat							
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Inovatif dan Berintegritas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	83	84	85	86	87	88	
		Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	80	81	82	83	84	85	

Tabel 3.2. Definisi Operasional dari Indikator Kinerja Utama Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2029

Tujuan	Indikator	Defenisi Operasional	Rumus Perhitungan	Sumber Data
Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah Yang menunjang Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat ketahanan pangan suatu wilayah, baik pada tingkat nasional maupun sub-nasional. IKP mengukur kemampuan wilayah tersebut dalam memastikan ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan bagi seluruh penduduknya. IKP digunakan untuk kepentingan dapat merancang kebijakan dan program yang tepat untuk meningkatkan ketahanan pangan di wilayah tersebut	$Y(j) = \sum_{i=1}^9 a_i X_{ij}$ Dimana: i : Indikator ke-1, 2, 3, ... 7, 8, dan 9 j : Kabupaten ke-1, 2, 3, ... 414, 415, dan 416; kota ke-1, 2, 3, ... 96, 97, dan 98 Y_j : Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-j a_i : Bobot masing-masing indikator ke-i X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-j	Badan Pangan Nasional
Sasaran	Indikator	Defenisi Operasional	Rumus Perhitungan	Sumber Data
Meningkatkan Kualitas Ketahanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan	Klasifikasi PPh konsumsi: - Baik nilai capaian PPh > 90 - Sedang nilai capain PPh antara 80-90 Kurang nilai capaian < 80 Kurang nilai capaian < 80	a. Kualitas konsumsi pangan masyarakat dipantau dengan menggunakan ukuran pola pangan harapan b. Skor PPH = % AKG (Angka Kecukupan Gizi) x Bobot komoditi atau Skor PPH = Skor PPH Kelompok Pangan x bobot setiap kelompok	Survei dan Quesioner Data Susenas Dinas Kesehatan

			Skor Pola Pangan Harapan adalah indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk PPH merupakan susunan pangan yang beragam didasarkan atas proporsi keseimbangan energi menurut kelompok maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk PPH merupakan susunan pangan yang beragam didasarkan atas proporsi keseimbangan energi menurut kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama	
	Persentase Bahan Pangan yang aman beredar di masyarakat	Memastikan Bahwa pangan yang beredar aman dan tidak berbahaya bagi Kesehatan masyarakat	Parameter uji laboratorium (Mengacu ke Permentan 53 Tahun 2018) yaitu : (1) residu pestisida dari golongan Organoklorin dan Organofospat ; (2) logam berat Lead (Pb), dan Cadmium (Cd); (3) mikrobiologi: Escherichia coli. dan Salmonella.	Hasil Uji Laboratorium

Tujuan	Indikator	Defenisi Operasional	Rumus Perhitungan	Sumber Data																																						
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik.	<table><tr><th rowspan="2">Komponen</th><th colspan="3">Sub-Komponen</th><th rowspan="2">Total Bobot</th></tr><tr><th>Sub-Komponen 1 Keberadaan</th><th>Sub-Komponen 2 Kualitas</th><th>Sub-Komponen 3 Pemanfaatan</th></tr><tr><td></td><td>20%</td><td>30%</td><td>50%</td><td></td></tr><tr><td>Perencanaan Kinerja</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>Pengukuran Kinerja</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>Pelaporan Kinerja</td><td>3</td><td>4,5</td><td>7,5</td><td>15</td></tr><tr><td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td><td>5</td><td>7,5</td><td>12,5</td><td>25</td></tr><tr><td>Nilai Akuntabilitas Kinerja</td><td>20</td><td>30</td><td>50</td><td>100</td></tr></table> Sumber : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2021	Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot	Sub-Komponen 1 Keberadaan	Sub-Komponen 2 Kualitas	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan		20%	30%	50%		Perencanaan Kinerja	6	9	15	30	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100	Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin
Komponen	Sub-Komponen				Total Bobot																																					
	Sub-Komponen 1 Keberadaan	Sub-Komponen 2 Kualitas	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan																																							
	20%	30%	50%																																							
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30																																						
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30																																						
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15																																						
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25																																						
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100																																						
Sasaran	Indikator	Defenisi Operasional	Rumus Perhitungan	Sumber Data																																						
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka	Indikator Penilaian : 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Kinerja	Inspektorat																																						

		pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah: 1. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; 2. menilai tingkat implementasi SAKIP; 3. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan 4. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya		
Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas jabatan. IP ASN ini digunakan untuk menilai tingkat profesionalisme ASN dan dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pengembangan kompetensi ASN.	Keterangan : IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke i IP_1 = Indeks Profesionalisme dimensi kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi Ke j * Rating jawaban indikator kualifikasi j	BKPSDM

			$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot Indikator Kualifikasi Ke k * Rating jawaban indikator kualifikasi k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot Indikator Kualifikasi Ke l * Rating jawaban indikator kualifikasi l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot Indikator Kualifikasi Ke m * Rating jawaban indikator kualifikasi m (Semua perhitungan diproses di aplikasi PADARINGAN)	
--	--	--	--	--

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan amanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

Strategi merupakan bagian dari proses pencapaian tujuan dari suatu perencanaan. Strategi dipergunakan untuk mempermudah, mengefisienkan serta mengefektifkan pencapaian tujuan. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Strategi dan kebijakan pembangunan ketahanan pangan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif dengan tetap memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan, maka strategi dan arah kebijakan tersebut di atas akan digunakan sebagai pedoman serta tolok ukur dalam

Mencapai yang diinginkan. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3. Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Peningkatan daya saing SDM dan Pengembangan Sektor Ketahanan Pangan	Penguatan Perekonomian dengan infrastruktur ketahanan pangan	Pemantapan infrastruktur ketahanan pangan	Pemantapan yang mendorong hirilisasi industri ketahanan pangan	Penguatan pondasi gerbang logistik yang menyejahterakan masyarakat melalui distribusi pangan yang berbasis digital

Tabel 3.4 Strategis dan Arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin

Tujuan /Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah										
1	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	1	Pemenuhan kebutuhan administrasi, sarana dan prasarana perkantoran	1	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran					
				2	Meningkatan efesiensi penggunaan bahan habis pakai administrasi perkantoran					
				3	Meningkatan efektivitas pengelolaan barang milik daerah					
		2	Meningkatkan Kualitas pelayanan	1	Peningkatan Capaian Kinerja pegawai					

2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan	1	Meningkatkan ketepatan waktu pelaporan kinerja dan keuangan					
		2	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	1	meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah					
Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah Yang menunjang Kesejahteraan Masyarakat										
1	Meningkatkan Kualitas Ketahanan dan Keamanan Pangan Daerah	1	Meningkatnya produksi pangan utama dengan mutu dan jumlah yang cukup	1	Peningkatan produksi pangan utama dengan mutu dan jumlah yang cukup					
		2	Promosi konsumsi pangan local	1	Peningkatan Konsumsi dan kemandirian pangan					
		3	Meningkatnya penanganan untuk	1	Peningkatan penanganan untuk mengatasi daerah rawan pangan					

			mengatasi daerah rawan pangan							
		4	Meningkatnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	1	Peningkatan Keamanan pangan					

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Dalam upaya mencapai sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin tahun 2025 – 2029, maka langkah operasionalnya adalah menuangkan ke dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Penyajian program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi selama 5 (lima) tahun dimulai pada tahun 2025 sampai dengan 2029.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat

Kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Dalam perkembangan periode 5 (lima) tahun, upaya pemantapan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin melalui pelaksanaan 5 (lima) program, yakni:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota. Outcome yang harus dicapai yaitu : Capaian SAKIP Perangkat Daerah
2. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan. Outcome yang harus dicapai adalah Tercapainya Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Lantai Jemur.
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Outcome yang harus dicapai adalah Kenaikan Konsumsi Bahan Pangan Non-beras/terigu dan pengisian stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang terpenuhi.

4. Program Penanganan Kerawanan Pangan. Outcome yang harus dicapai tertangannya Daerah Rawan Pangan.
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan. Outcome yang harus dicapai Terawasinya keamanan Pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan.

Kegiatan Sebagai Bagian dari Program yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output). Kegiatan tersebut meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah
 - b. Administrasi Keuangan perangkat daerah
 - c. Administrasi Umum perangkat daerah
 - d. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
 - e. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
2. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
 - a. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilitasi pasokan harga pangan
 - b. Pengelolaan dan keseimbangan Cadangan pangan kabupaten/kota
 - c. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai angka kecukupan gizi
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan
 - b. Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota

5. Program Pengawasan Keamanan Pangan

a. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas dari kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Sub Kegiatan tersebut meliputi :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan perangkat daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Administrasi Umum perangkat daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Penyediaan Insfrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota
 - Penyediaan insfrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya
7. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan#
 - Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
8. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
9. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
10. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
11. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota

- Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

12. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Sarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
- Rekomendasi Keamanan Pangan Segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota
- Rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan
- Koordinasi dan Sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
- Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Inovatif dan Berintegritas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah				Nilai SAKIP		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)		Nilai Komponen AKIP	Prog : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	Keg : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas Pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti		

			Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti		
	Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan		Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti		
				Sub : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
		Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan		
			Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Keg : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Sub : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

					Sub : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah		
	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah			Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah		
		Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	Prog : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya ASN yang berkualitas	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	Keg : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Sub : Penyediaan Komponen Instalasi	
					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

					Sub : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Sub : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Sub : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Sub : Penyediaan Bahan/Material	
					Sub : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	Keg : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Sub : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

						Sub : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Sub : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	
						Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	Keg : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub : Penyediaan Jasa	
						Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Sub : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
Menurunnya kemiskinan dan Ketimpangan	Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah Yang menunjang				Indeks Ketahanan Pangan		
		Meningkatkan Kualitas Ketahanan			Skor Pola Pangan Harapan		

	Kesejahteraan Masyarakat	dan Keamanan Pangan Daerah			Persentase bahan pangan yang aman beredar di masyarakat		
			Meningkatnya diversifikasi pangan		Persentase kenaikan konsumsi bahan pangan non beras / non terigu	Prog : Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
				Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang diversifikasi pangan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pengetahuan tentang diversifikasi pangan	Keg : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
				Terlaksananya Lomba Cipta Menu B2SA / Festival Pangan Lokal B2SA	Persentase peserta yang mengikuti Lomba Cipta Menu B2SA / Festival Pangan Lokal B2SA		
				Terlaksananya Penyuluhan Pangan B2SA	Persentase peserta yang mengikuti Penyuluhan Pangan B2SA		
				Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal	Persentase peserta yang mengikuti Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal		

						Sub : Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
				Meningkatnya pemanfaatan lahan pekarangan rumah sebagai sumber pangan	Persentase masyarakat yang memanfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai sumber pangan	Keg : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
				Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan lahan pekarangan	Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi pemanfaatan lahan pekarangan		
				Tersalurnya benih atau bibit tanaman sayuran	Persentase masyarakat yang memanfaatkan benih atau bibit tanaman sayuran		
				Terlaksananya pembinaan masyarakat terkait pemanfaatan lahan pekarangan	Persentase pelaksanaan pembinaan masyarakat terkait pemanfaatan lahan pekarangan		
						Sub : Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	

						Sub : Pemberdayaan	
						Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			Meningkatnya pengawasan keamanan pangan daerah		Persentase pengawasan pangan daerah yang dilaksanakan sesuai aturan	Prog : Pengawasan Keamanan Pangan	
				Meningkatnya jumlah SDM yang kompeten dalam pengambilan sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persentase SDM pengambil sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan yang bersertifikat	Keg : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya pengambilan dan pengujian jenis sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan untuk keamanan pangan di daerah	Persentase peningkatan jumlah sampel uji keamanan pangan terhadap Pangan Segar Asal Tumbuhan yang beredar di pasar induk daerah		

				Meningkatnya keikutsertaan Bimbingan Teknis Petugas Pengambil Contoh Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persentase SDM yang lulus Bimbingan Teknis		
				Terlaksananya monitoring keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persentase pelaksanaan monitoring keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan di pasar induk		
				Terlaksananya pengujian keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persentase jumlah sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan yang diuji		
						Sub : Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	

						sub: Rekomendasi Keamanan Pangan Segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota	
						Sub: Rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	
						Sub: Koordinasi dan Sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
						Sub : Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
			Menurunnya daerah rawan pangan		Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	Program Penanganan Kerawanan Pangan	
				Meningkatnya SDM pengolah data identifikasi daerah rawan pangan yang kompeten	Persentase SDM yang lulus bimtek	Keg : Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	

				Tersedianya data daerah rawan pangan pada perangkat daerah yang terkait	Persentase data daerah rawan pangan pada perangkat daerah yang lengkap		
						Sub : Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	
				Meningkatnya identifikasi terhadap daerah rawan pangan	Persentase desa rawan pangan yang teridentifikasi	Keg : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Memenuhi kebutuhan pangan keluarga di daerah rawan pangan	Persentase keluarga yang memiliki sumber pangan mandiri		
				Terlaksananya penyaluran bantuan beras, bahan pangan pokok kepada keluarga miskin dan stunting di daerah rawan pangan dan lokus stunting	Persentase KK yang menerima bantuan		

				Monitoring dan evaluasi terhadap bantuan yang telah diberikan	Jumlah penerima bantuan yang dimonev		
				Sosialisasi / penyuluhan budidaya bantuan yang diberikan kepada calon penerima bantuan	Jumlah penerima bantuan yang mengikuti sosialisasi / penyuluhan		
				Pemberian bantuan bibit ternak, sayur dan pupuk	Jumlah penerima bantuan		
				Tersedianya data keluarga stunting penerima bantuan	Persentase data keluarga stunting penerima bantuan		
				Tersalurnya bantuan beras kepada keluarga miskin	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan bantuan		
				Tersalurnya bantuan bahan pangan pokok kepada keluarga stunting	Persentase keluarga stunting yang mendapatkan bantuan		
				Tersedianya data KK penerima bantuan sosial	Persentase data KK penerima bantuan sosial		

						Sub : Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub : Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)		Persentase stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Prog : Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
				Optimalnya informasi harga pangan ke masyarakat	Persentase informasi harga pangan yang update rutin	Keg : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
				Tersedianya data ketersediaan pangan di daerah	Persentase data ketersediaan pangan di daerah yang valid		
				Terlaksananya koordinasi dengan	Persentase data pangan bahan pokok yang dipenuhi		

				perangkat daerah lain			
				Tersedianya data bahan pangan pokok di Kabupaten	Persentase data bahan pangan pokok di Kabupaten		
						Sub : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	
						Sub : Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
						Sub : Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	
						Sub : Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	

						Sub : Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
			Meningkatnya stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)		Persentase stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Prog : Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	
				Meningkatnya pemanfaatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Persentase Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang dimanfaatkan	Keg : Penyediaan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pembinaan pemanfaatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Persentase Lumbung Pangan Masyarakat yang kembali beroperasi		
						Sub : Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	
				Terlaksananya pengadaan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Persentase pengadaan yang menghasilkan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sesuai dengan aturan	Keg : Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	

				Terlaksananya pemeliharaan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Persentase pemeliharaan stok Cadangan Pemerintah (CPP)		
				Terlaksananya penyaluran stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Persentase jumlah penyaluran stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)		
				Terlaksananya pengisian stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Persentase pengisian gabah untuk stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)		
				Terlaksana nya refreshing Stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Persentase Stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di refrehing		
						Sub : Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
						Sub : Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	

Tabel. 4.2. Rencana Program / Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	KINERJ A	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URUSAN PEMERINTAH: URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PANGAN					7.324.3 73.613		7.721.9 55.541		8.061.6 17.685		8.417.3 77.066		8.790.0 51.109	
BIDANG URUSAN PANGAN					7.324.3 73.613		7.721.9 55.541		8.061.6 17.685		8.417.3 77.066		8.790.0 51.109	
PROGRAM URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Mening katnya capaian LAKIP (Lapora n Akunta bilitas Kinerja Instansi Pemer intah)	Nilai Komponen AKIP	82%	84%	5.000.911 .153	85%	5.005.697 .122	86%	5.255.981 .976	87%	5.518.781 .076	88%	5.794.720 .133	

	Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	41%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase tindak lanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100%	100%	70.295.800	100%	73.810.590	100%	77.501.120	100%	81.376.175	100%	85.444.984	

		Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	11 Laporan	11 Laporan	70.295.800	11 Laporan	73.810.590	11 Laporan	77.501.120	11 Laporan	81.376.175	11 Laporan	85.444.984	

		Realisasi Kinerja SKPD												
		Jumlah Dokumen Perencanaan yang teradministrasi dan tersipkan	20 Dokumen	20 Dokumen		20 Dokumen		20 Dokumen		20 Dokumen		20 Dokumen		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Surat Pertanggung jawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100%	100%	3.120.254.151	100%	3.121.525.331	100%	3.277.601.598	100%	3.441.481.677	100%	3.613.555.761	
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		

		Akuntansi Pemerintah an (SAP)												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/ Bulan	22 Orang/ Bulan	3.094.830 .551	22 Orang/ Bulan	3.094.830 .551	22 Orang/ Bulan	3.249.572 .079	22 Orang/ Bulan	3.412.050 .682	22 Orang/ Bulan	3.582.653 .217	
		Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan berdasarkan Daftar gaji dan Tunjangan untuk tertib pembayaran	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan	25.423.60 0	2 Laporan	26.694.78 0	2 Laporan	28.029.51 9	2 Laporan	29.430.99 5	2 Laporan	30.902.54 5	

		Akhir Tahun SKPD											
		Jumlah Dokumen Keuangan yang teradministrasi dan tersampaikan	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	100%	100%	1.449.346.800	100%	1.449.346.799	100%	1.521.814.137	100%	1.597.904.845	100%	1.677.800.091
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	13.225.900	12 Paket	13.225.900	12 Paket	13.887.195	12 Paket	14.581.555	12 Paket	15.310.632
		Jumlah Pengadaan Komponen instalasi	4 Laporan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan	

		peralatan Listrik Kantor										
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	349.032.700	12 Paket	349.032.700	12 Paket	366.484.335	12 Paket	384.808.552	12 Paket	404.048.979
	Jumlah Pasokkan Peralatan dan Perlengkapan kantor yang terpenuhi	4 Laporan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	186.679.000	12 Paket	186.679.000	12 Paket	196.012.950	12 Paket	205.813.598	12 Paket	216.104.277
	Jumlah Pasokkan Bahan Logistik Kantor yang terpenuhi	4 Laporan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket	32.485.600	12 Paket	32.485.600	12 Paket	34.109.880	12 Paket	35.815.374	12 Paket	37.606.143

		yang Disediakan											
		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang terpenuhi	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	
		Jumlah Paket Bahan/Mater ial yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Pasokkan Penyediaan Bahan/Mater ial yang terpenuhi	1 lapora n	1 lapora n	7.107.900	1 lapora n	7.107.900	1 lapora n	7.463.295	1 lapora n	7.836.460	1 lapora n	8.228.283
		Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lapora n	12 Lapora n		12 Lapora n		12 Lapora n		12 Lapora n		12 Lapora n	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah total rapat koordinasi dan konsultasi yang telah	12 Lapora n	12 Lapora n	860.815.7 00	12 Lapora n	860.815.6 99	12 Lapora n	903.856.4 82	12 Lapora n	949.049.3 07	12 Lapora n	996.501.7 76

		dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan												
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	100%	100%	122.628.152	100%	122.628.152	100%	128.759.560	100%	135.197.538	100%	141.957.414	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	52.031.552	12 Laporan	52.031.552	12 Laporan	54.633.130	12 Laporan	57.364.786	12 Laporan	60.233.025	
		Jumlah Operasional Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik kantor yang terbayarkan	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lapora n	12 Lapora n	70.596.60 0	12 Lapora n	70.596.60 0	12 Lapora n	74.126.43 0	12 Lapora n	77.832.75 2	12 Lapora n	81.724.38 9	
		Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor terlaksana	12 Bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	100%	100%	238.386.2 50	100%	238.386.2 50	100%	250.305.5 63	100%	262.820.8 41	100%	275.961.8 83	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	23 Unit	182.513.6 00	23 Unit	182.513.6 00	23 Unit	191.639.2 80	23 Unit	201.221.2 44	23 Unit	211.282.3 06	

		Jumlah Aset Kendaraan dinas yang terpelihra	24 Unit	24 Unit		24 Unit		24 Unit		24 Unit		24 Unit		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	13.968.650	40 Unit	13.968.650	40 Unit	14.667.083	40 Unit	15.400.437	40 Unit	16.170.458	
		Jumlah Aset yang tercatat	40 Unit	40 Unit		40 Unit		40 Unit		40 Unit		40 Unit		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	1 Unit	1 Unit	41.904.000	1 Unit	41.904.000	1 Unit	43.999.200	1 Unit	46.199.160	1 Unit	48.509.118	
		Jumlah Dokumen terkait Sarana dan Prasarana	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK MENDUKUNG KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya stok Cadangan	Persentase Stok Cadangan Pangan	25%	15%	0	15%	288.540.921	15%	268.450.420	15%	246.469.523	15%	222.516.275	

	Pangan Pemerintah (CPP)	pemerintah (CPP)												
Penyediaan Insfrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota		Persentase lumbung pangan masyarakat (LPM) yang dimanfaatkan	100%	100%	0	100%	288.540.921	100%	268.450.420	100%	246.469.523	100%	222.516.275	
		Persentase pengadaan yang menghasilkan stok cadangan pangan pemerintah (CPP) sesuai arahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Penyediaan insfrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya		Jumlah Lumbung Pangan Yang Tersedia	-	-	0	1 unit	288.540.921	1 unit	268.450.420	1 unit	246.469.523	1 unit	222.516.275	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya diversifikasi pangan	Persentase kenaikan konsumsi bahan pangan non beras / terigu	10%	10%	1.923.140.442	10%	2.019.297.464	10%	2.120.262.337	10%	2.226.275.454	10%	2.337.589.227	

	Meningkatnya stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Persentase stok cadangan pangan pemerintah (CPP)	25%	15%		15%		15%		15%		15%		
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Persentase masyarakat yang mendapatkan pengetahuan tentang diversifikasi pangan	100%	100%	1.157.800.426	100%	1.215.690.447	100%	1.276.474.970	100%	1.340.298.718	100%	1.407.313.654	
Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase informasi harga pangan yang Update rutin	100%	100%	8.307.550	100%	8.722.928	100%	9.159.074	100%	9.617.028	100%	10.097.879	
		Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah	2 Laporan	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		

		Kabupaten/Kota												
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Persentase peserta yang mengikuti Lomba Cipta Menu B2SA / Festival Pangan Lokal B2SA	100%	100%	445.485.726	100%	467.760.012	100%	491.148.013	100%	515.705.414	100%	541.490.684	
		Persentase peserta yang mengikuti Penyuluhan Pangan B2SA	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase peserta yang mengikuti Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal	100%	100%		100%		100%		100%		100%		

		Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-	48 Keluarga		48 Keluarga		48 Keluarga		48 Keluarga		48 Keluarga		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		Persentase data bahan pangan pokok di Kabupaten	100%	100%	25.866.000	100%	27.159.300	100%	28.517.265	100%	29.943.128	100%	31.440.285	
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2 Laporan	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota		Persentase data ketersediaan pangan di daerah yang valid	100%	100%	640.017.250	100%	672.018.113	100%	705.619.018	100%	740.899.969	100%	777.944.967	

		Jumlah Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		
Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota		Persentase lumbung pangan masyarakat (LPM) yang dimanfaatkan	100%	100%	7.389.900	100%	7.759.395	100%	8.147.365	100%	8.554.733	100%	8.982.470	
		persentase lumbung pangan yang kembali beroperasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
		Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	3 Unit	3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit		
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)		persentase data pangan bahan pokok yang dipenuhi	100%	100%	30.734.000	100%	32.270.700	100%	33.884.235	100%	35.578.447	100%	37.357.369	

		Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokum en	1 Dokum en		1 Dokum en		1 Dokum en		1 Dokum en		1 Dokum en		
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		Persentase pengadaan yang menghasilkan stok cadangan pangan pemerintah (CPP) sesuai dengan aturan	100%	100%	289.039.600	100%	303.491.580	100%	318.666.159	100%	334.599.467	100%	351.329.440	
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	21 Ton	15 Ton		15 Ton		15 Ton		15 Ton		15 Ton		
		Persentase Pengisian Gabah untuk Stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	100%	100%	265.895.000	100%	279.189.750	100%	293.149.238	100%	307.806.699	100%	323.197.034	

		Persentase jumlah Penyaluran Stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	31 Ton	31 Ton	23.144.600	31 Ton	24.301.830	31 Ton	25.516.922	31 Ton	26.792.768	31 Ton	28.132.406
		Persentase Pemeliharaan Stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
		Persentase stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di refreshing	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Persentase masyarakat yang memanfaatkan	100%	100%	476.300.416	100%	500.115.437	100%	525.121.209	100%	551.377.269	100%	578.946.133

		an lahan pekarangan rumah sebagai sumber pangan												
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun		Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	5 Dokum en	5 Dokum en	30.110.00 0	5 Dokum en	31.615.50 0	5 Dokum en	33.196.27 5	5 Dokum en	34.856.08 9	5 Dokum en	36.598.89 3	
		Persentase masyarakat yang memanfaatk an benih atau bibit tanaman sayuran	100%	100%										
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Jumlah Pemberdayaa n Kelompok Masyarakat dalam Penganekara gaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	5 Lapora n	5 Lapora n	446.190.4 16	5 Lapora n	468.499.9 37	5 Lapora n	491.924.9 34	5 Lapora n	516.521.1 80	5 Lapora n	542.347.2 39	

		Persentase pelaksanaan pembinaan masyarakat terkait pemanfaatan lahan pekarangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi pemanfaatan lahan pekarangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Menurutnya daerah rawan pangan	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	12,5%	12,5%	161.960.300	12,5%	170.058.315	12,5%	178.561.231	12,5%	187.489.292	12,5%	196.863.757	
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		Persentase daerah rawan pangan yang teridentifikasi	100%	100%	56.148.000	100%	58.955.400	100%	61.903.170	100%	64.998.329	100%	68.248.245	
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		Peta dan Analisis Ketahanan	2 Dokumen	2 Dokumen	56.148.000	2 Dokumen	58.955.400	2 Dokumen	61.903.170	2 Dokumen	64.998.329	2 Dokumen	68.248.245	

		dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan											
		Persentase data daerah rawan pangan pada perangkat daerah yang lengkap	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
		Persentase SDM yang lulus Bimek	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase keluarga yang memiliki sumber pangan mandiri	100%	100%	105.812.300	100%	111.102.915	100%	116.658.061	100%	122.490.964	100%	128.615.512
		Persentase Keluarga miskin yang mendapatkan bantuan	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
		Persentase keluarga stunting	100%	100%		100%		100%		100%		100%	

		yang mendapatka n bantuan												
		Persentase data keluarga stunting penerima bantuan benih atau bibit tanaman sayur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/K ota	2 Lapora n	2 Lapora n	66.550.30 0	2 Lapora n	69.877.81 5	2 Lapora n	73.371.70 6	2 Lapora n	77.040.29 1	2 Lapora n	80.892.30 6	
		Persentase data KK penerima bantuan sosial	100%	100%		100%		100%		100%		100%		

		Jumlah Penerima bantuan yang mengikuti sosialisasi / Penyuluhan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	39.262.000	1 Dokumen	41.225.100	1 Dokumen	43.286.355	1 Dokumen	45.450.673	1 Dokumen	47.723.206	
		Persentase KK penerima bantuan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
		Jumlah Penerima Bantuan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
		Jumlah penerima bantuan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		

		yang dimonev												
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya pengawasan keamanan pangan daerah	Persentase pengawasan pangan daerah yang dilaksanakan sesuai aturan	100%	100%	238.361.718	100%	238.361.718	100%	238.361.718	100%	238.361.718	100%		
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Persentase SDM pengambil sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan yang bersertifikat	100%	100%	238.361.718	100%	238.361.718	100%	238.361.718	100%	238.361.718	100%		
		Persentase peningkatan jumlah sampel uji keamanan pangan terhadap Pangan Segar Asal Tumbuhan yang	50%	50%		50%		50%		50%		50%		

		beredar di pasar induk daerah												
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	5 Dokum en	5 Dokum en	198.361.718	5 Dokum en	198.361.718	5 Dokum en	198.361.718	5 Dokum en	198.361.718	5 Dokum en	198.361.718	
		Persentase SDM yang lulus Bimbingan Teknis	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase pelaksanaan monitoring keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan di pasar induk	100%	100%		100%		100%		100%		100%		

		Persentase jumlah sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan yang diuji	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	
Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan		Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	
Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	-	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	

Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	
---	--	---	---	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--

Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya diversifikasi pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	

			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
			Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
	Meningkatnya stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	
			Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	

			Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	
			Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
2	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

			Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	
3	Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya pengawasan keamanan pangan daerah	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Menurunnya daerah rawan pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
			Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
5	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
		Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
		Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan/Material	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

Tabel. 4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	93	93	94	94	95	96	

2	Persentase bahan pangan yang aman beredar di masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83	84	85	86	87	88	
4	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Nilai	80	81	82	83	84	85	

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/Jagung Sesuai Kebutuhan)	Persen	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	0,80	
---	---	--------	------	------	------	------	------	------	--

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin 2025 - 2029 ini disusun dengan harapan dapat dijadikan pedoman dan arah langkah bagi perkembangan institusi ini kedepan. Renstra ini hanyalah dokumen tanpa arti apabila pihak–pihak yang berkepentingan tidak konsisten mewujudkannya, tetapi sebaliknya akan menjadi sangat bermanfaat apabila ada kemauan kuat dalam memanifestasikannya.

Kesalahan kecil, maupun kekurangan akan selalu ada dalam dokumen ini, tetapi kami yakin tidak akan mengurangi substansinya. Harapan selanjutnya semoga dokumen ini bermanfaat bagi Dinas Ketahanan Pangan dan pihak – pihak lain yang memerlukannya.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami dinamika perubahan maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2029 tidak bersifat kaku dan senantiasa dinamis Dengan demikian, penting bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin untuk mengedepankan aspek perencanaan perangkat daerah beserta fungsi pengendalian dan evaluasi.

Bupati Tapin

Yamani

LAMPIRAN

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan											
- meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - menurunnya kemiskinan dan ketimpangan	Meningkatkan Kualitas Ketahanan dan Keamanan Pangan Daerah - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah		Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	93,21	93	93	94	94	95	96	
			Persentase Bahan Pangan Yang Aman Beredar Di Masyarakat (%)	100	100	100	100	100	100		
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	81,95	83	84	85	86	87	88	
			Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah (Poin)	78	80	81	82	83	84	85	
	Meningkatkan Kualitas Ketahanan dan Keamanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	91,25	93	93	94	94	95	96		
		Persentase Bahan Pangan Yang Aman Beredar Di Masyarakat (%)	100	100	100	100	100	100	100		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	81,95	83	84	85	86	87	88		
	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah (Poin)	78	80	81	82	83	84	85		

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					7.324.373.613		7.721.955.541		8.061.617.685		8.417.377.066		8.790.051.108	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.000.911.153		5.005.697.122		5.255.981.977		5.518.781.077		5.794.720.132	
Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Angka)	81,95	83	84	70.295.800	85	73.810.590	86	77.501.120	87	81.376.175	88	85.444.984	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	3.120.254.151	100	3.121.525.331	100	3.277.601.598	100	3.441.481.677	100	3.613.555.762	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	41	78	79	1.449.346.800	80	1.449.346.799	81	1.521.814.136	82	1.597.904.846	83	1.677.800.090	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	100	100	100	361.014.402	100	361.014.402	100	379.065.123	100	398.018.379	100	417.919.296	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					0		288.540.921		268.450.420		246.469.523		222.516.275	
Meningkatnya stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Persentase Stok Cadangan Pangan pemerintah (CPP) (%)	25	15	15	0	15	288.540.921	15	268.450.420	15	246.469.523	15	222.516.275	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					1.923.140.442		2.019.297.465		2.120.262.339		2.226.275.455		2.337.589.226	
Meningkatnya diversifikasi pangan	Persentase kenaikan konsumsi bahan pangan non beras / terigu (%)	10	10	10	921.786.142	10	967.875.449	10	1.016.269.222	10	1.067.082.683	10	1.120.436.816	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
Meningkatnya stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Persentase Stok Cadangan Pangan pemerintah (CPP) (%)	25	15	15	1.001.354.300	15	1.051.422.016	15	1.103.993.117	15	1.159.192.772	15	1.217.152.410	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					161.960.300		170.058.315		178.561.231		187.489.293		196.863.757	
Menurunnya daerah rawan pangan	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani (%)	12,5	15	15	161.960.300	15	170.058.315	15	178.561.231	15	187.489.293	15	196.863.757	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					238.361.718		238.361.718		238.361.718		238.361.718		238.361.718	
Meningkatnya pengawasan keamanan pangan daerah	Persentase pengawasan pangan daerah yang dilaksanakan sesuai aturan (%)	100	100	100	238.361.718	100	238.361.718	100	238.361.718	100	238.361.718	100	238.361.718	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
TOTAL KESELURUHAN					7324373613.00		7721955541.00		8061617685.00		8417377066.00		8790051108.00	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan							
- menurunnya kemiskinan dan ketimpangan - meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatkan Kualitas Ketahanan dan Keamanan Pangan Daerah - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah				Skor Pola Pangan Harapan (Skor)		
					Persentase Bahan Pangan Yang Aman Beredar Di Masyarakat (%)		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
					Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah (poin)		
	Meningkatkan Kualitas Ketahanan dan Keamanan Pangan Daerah	Meningkatkan Kualitas Ketahanan dan Keamanan Pangan Daerah			Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)		
					Persentase Bahan Pangan Yang Aman Beredar Di Masyarakat (%)		
					Persentase Stok Cadangan Pangan pemerintah (CPP) (%)	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
					Meningkatnya pemanfaatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	
					Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)		
					Persentase kenaikan konsumsi bahan pangan non beras / terigu (%)	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang diversifikasi pangan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
				Terlaksananya Lomba Cipta Menu B2SA / Festival Pangan Lokal B2SA		2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
						2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
				Terlaksananya Penyuluhan Pangan B2SA		2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
						2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
				Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal		2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
						2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya pemanfaatan lahan pekarangan rumah sebagai sumber pangan	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
					Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
				Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan lahan pekarangan		2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
						2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
				Tersalurnya benih atau bibit tanaman sayuran	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
					Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	
				Terlaksananya pembinaan masyarakat terkait pemanfaatan lahan pekarangan		2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
						2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
			Menurunnya daerah rawan pangan		Persentase daerah rawan pangan yang tertangani (%)	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
				Meningkatnya SDM pengolah data identifikasi daerah rawan pangan yang kompeten	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
					Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	
				Tersedianya data daerah rawan pangan pada perangkat daerah yang terkait		2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
						2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya identifikasi terhadap daerah rawan pangan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya penyaluran bantuan beras, bahan pangan pokok kepada keluarga miskin di daerah rawan pangan	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Memenuhi kebutuhan pangan keluarga di daerah rawan pangan		2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
						2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Monitoring dan evaluasi terhadap bantuan yang telah diberikan		2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
						2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Sosialisasi / penyuluhan budidaya bantuan yang diberikan kepada calon penerima bantuan		2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
						2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Pemberian bantuan bibit ternak, sayur dan pupuk		2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
						2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Tersalurnya bantuan beras kepada keluarga miskin		2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
						2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya data KK penerima bantuan sosial		2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
						2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pengawasan keamanan pangan daerah		Persentase pengawasan pangan daerah yang dilaksanakan sesuai aturan (%)	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
				Meningkatnya pengambilan dan pengujian jenis sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan untuk keamanan pangan di daerah	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya jumlah SDM yang kompeten dalam pengambilan sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.2.01.0009 - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
				Meningkatnya keikutsertaan Bimbingan Teknis Petugas Pengambil Contoh Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)	2.09.05.2.01.0008 - Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
				Terlaksananya monitoring keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pengujian keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.2.01.0006 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)		Persentase Stok Cadangan Pangan pemerintah (CPP) (%)	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Optimalnya informasi harga pangan ke masyarakat	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.09.03.2.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya koordinasi dengan perangkat daerah lain	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	2.09.03.2.01.0003 - Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	
				Tersedianya data ketersediaan pangan di daerah	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pembinaan pemanfaatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	2.09.03.2.01.0010 - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya data bahan pangan pokok di Kabupaten	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
				Terlaksananya pengadaan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pemeliharaan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara (Ton)	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara (Ton)	2.09.03.2.02.0006 - Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	
				Terlaksananya penyaluran stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)		2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
						2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pengisian stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)		2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
						2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksana nya refreshing Stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)		2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
						2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan										
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	93,21	93	93	94	94	95	96	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	91,25	93	93	94	94	95	96	
2	Persentase Bahan Pangan Yang Aman Beredar Di Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan Beras/Jagung sesuai kebutuhan)	%	0,56	0,6	0,65	0,7	0,75	0,8	0,8	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				7.324.373.613		7.721.955.541		8.061.617.685		8.417.377.066		8.790.051.108		
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.000.911.153		5.005.697.122		5.255.981.977		5.518.781.077		5.794.720.132		
Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Angka)	81,95	84	70.295.800	85	73.810.590	86	77.501.120	87	81.376.175	88	85.444.984	2.09.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Ketahanan Pangan	
2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				70.295.800		73.810.590		77.501.120		81.376.175		85.444.984		
- Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Perangkat Daerah - Meningkatnya kualitas Pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	11	11	70.295.800	11	73.810.590	11	77.501.120	11	81.376.175	11	85.444.984		
2.09.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				70.295.800		73.810.590		77.501.120		81.376.175		85.444.984		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	11	11	70.295.800	11	73.810.590	11	77.501.120	11	81.376.175	11	85.444.984		
Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	3.120.254.151	100	3.121.525.331	100	3.277.601.598	100	3.441.481.677	100	3.613.555.762		
2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.120.254.151		3.121.525.331		3.277.601.598		3.441.481.677		3.613.555.762		
Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22	22	3.120.254.151	22	3.121.525.331	22	3.277.601.598	22	3.441.481.677	22	3.613.555.762		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2				2		2		2			
2.09.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.094.830.551		3.094.830.551		3.249.572.079		3.412.050.682		3.582.653.217		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22	22	3.094.830.551	22	3.094.830.551	22	3.249.572.079	22	3.412.050.682	22	3.582.653.217		
2.09.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				25.423.600		26.694.780		28.029.519		29.430.995		30.902.545		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	25.423.600	2	26.694.780	2	28.029.519	2	29.430.995	2	30.902.545		
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	41	79	1.449.346.800	80	1.449.346.799	81	1.521.814.136	82	1.597.904.846	83	1.677.800.090		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.449.346.800		1.449.346.799		1.521.814.136		1.597.904.846		1.677.800.090		
Meningkatnya ASN yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	1.449.346.800	12	1.449.346.799	12	1.521.814.136	12	1.597.904.846	12	1.677.800.090		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.09.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				13.225.900		13.225.900		13.887.195		14.581.555		15.310.632		
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	13.225.900	12	13.225.900	12	13.887.195	12	14.581.555	12	15.310.632		
2.09.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				349.032.700		349.032.700		366.484.335		384.808.552		404.048.979		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	349.032.700	12	349.032.700	12	366.484.335	12	384.808.552	12	404.048.979		
2.09.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				186.679.000		186.679.000		196.012.950		205.813.598		216.104.277		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	186.679.000	12	186.679.000	12	196.012.950	12	205.813.598	12	216.104.277		
2.09.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				32.485.600		32.485.600		34.109.880		35.815.374		37.606.143		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	32.485.600	12	32.485.600	12	34.109.880	12	35.815.374	12	37.606.143		
2.09.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				7.107.900		7.107.900		7.463.295		7.836.460		8.228.283		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	12	12	7.107.900	12	7.107.900	12	7.463.295	12	7.836.460	12	8.228.283		
2.09.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				860.815.700		860.815.699		903.856.481		949.049.307		996.501.776		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	860.815.700	12	860.815.699	12	903.856.481	12	949.049.307	12	996.501.776		
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	100	100	361.014.402	100	361.014.402	100	379.065.123	100	398.018.379	100	417.919.296		
2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				122.628.152		122.628.152		128.759.560		135.197.538		141.957.414		
Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	122.628.152	12	122.628.152	12	128.759.560	12	135.197.538	12	141.957.414		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				52.031.552		52.031.552		54.633.130		57.364.786		60.233.025		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	52.031.552	12	52.031.552	12	54.633.130	12	57.364.786	12	60.233.025		
2.09.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				70.596.600		70.596.600		74.126.430		77.832.752		81.724.389		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	70.596.600	12	70.596.600	12	74.126.430	12	77.832.752	12	81.724.389		
2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				238.386.250		238.386.250		250.305.563		262.820.841		275.961.882		
Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	24	23	238.386.250	23	238.386.250	23	250.305.563	23	262.820.841	23	275.961.882		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40	40		40		40		40		40			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
2.09.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				182.513.600		182.513.600		191.639.280		201.221.244		211.282.306		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	24	23	182.513.600	23	182.513.600	23	191.639.280	23	201.221.244	23	211.282.306		
2.09.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.968.650		13.968.650		14.667.083		15.400.437		16.170.458		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40	40	13.968.650	40	13.968.650	40	14.667.083	40	15.400.437	40	16.170.458		
2.09.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				41.904.000		41.904.000		43.999.200		46.199.160		48.509.118		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	41.904.000	1	41.904.000	1	43.999.200	1	46.199.160	1	48.509.118		
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				0		288.540.921		268.450.420		246.469.523		222.516.275		
Meningkatnya stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Persentase Stok Cadangan Pangan pemerintah (CPP) (%)	25	15	0	15	288.540.921	15	268.450.420	15	246.469.523	15	222.516.275	2.09.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Ketahanan Pangan	
2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				0		288.540.921		268.450.420		246.469.523		222.516.275		
Meningkatnya pemanfaatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	0	0	0	1	288.540.921	1	268.450.420	1	246.469.523	1	222.516.275		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya				0		288.540.921		268.450.420		246.469.523		222.516.275		
Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	0	0	0	1	288.540.921	1	268.450.420	1	246.469.523	1	222.516.275		
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				1.923.140.442		2.019.297.465		2.120.262.339		2.226.275.455		2.337.589.226		
Meningkatnya diversifikasi pangan	Persentase kenaikan konsumsi bahan pangan non beras / terigu (%)	10	10	921.786.142	10	967.875.449	10	1.016.269.222	10	1.067.082.683	10	1.120.436.816	2.09.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Ketahanan Pangan	
2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				1.157.800.426		1.215.690.448		1.276.474.970		1.340.298.719		1.407.313.654		
Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang diversifikasi pangan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	0	48	445.485.726	48	467.760.012	48	491.148.013	48	515.705.414	48	541.490.684		
2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				445.485.726		467.760.012		491.148.013		515.705.414		541.490.684		
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	0	48	445.485.726	48	467.760.012	48	491.148.013	48	515.705.414	48	541.490.684		
Terlaksananya Lomba Cipta Menu B2SA / Festival Pangan Lokal B2SA				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Penyuluhan Pangan B2SA				0		0		0		0		0		
2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				476.300.416		500.115.437		525.121.209		551.377.269		578.946.132		
Meningkatnya pemanfaatan lahan pekarangan rumah sebagai sumber pangan	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	5	5	446.190.416	5	468.499.937	5	491.924.934	5	516.521.180	5	542.347.239		
2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				446.190.416		468.499.937		491.924.934		516.521.180		542.347.239		
Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	5	5	446.190.416	5	468.499.937	5	491.924.934	5	516.521.180	5	542.347.239		
Terlaksananya pembinaan masyarakat terkait pemanfaatan lahan pekarangan				0		0		0		0		0		
Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan lahan pekarangan				0		0		0		0		0		
Tersalurnya benih atau bibit tanaman sayuran	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	5	5	30.110.000	5	31.615.500	5	33.196.275	5	34.856.089	5	36.598.893		
2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				30.110.000		31.615.500		33.196.275		34.856.089		36.598.893		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	5	5	30.110.000	5	31.615.500	5	33.196.275	5	34.856.089	5	36.598.893		
Meningkatnya stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Persentase Stok Cadangan Pangan pemerintah (CPP) (%)	25	15	1.001.354.300	15	1.051.422.016	15	1.103.993.117	15	1.159.192.772	15	1.217.152.410		
2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				1.157.800.426		1.215.690.448		1.276.474.970		1.340.298.719		1.407.313.654		
Optimalnya informasi harga pangan ke masyarakat	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	2	2	8.307.550	2	8.722.928	2	9.159.074	2	9.617.028	2	10.097.879		
2.09.03.2.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota				8.307.550		8.722.928		9.159.074		9.617.028		10.097.879		
Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	2	2	8.307.550	2	8.722.928	2	9.159.074	2	9.617.028	2	10.097.879		
Terlaksananya koordinasi dengan perangkat daerah lain	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	2	2	25.866.000	2	27.159.300	2	28.517.265	2	29.943.128	2	31.440.285		
2.09.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				25.866.000		27.159.300		28.517.265		29.943.128		31.440.285		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	2	2	25.866.000	2	27.159.300	2	28.517.265	2	29.943.128	2	31.440.285		
Terlaksananya pembinaan pemanfaatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	3	3	7.389.900	3	7.759.395	3	8.147.365	3	8.554.733	3	8.982.470		
2.09.03.2.01.0010 - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota				7.389.900		7.759.395		8.147.365		8.554.733		8.982.470		
Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	3	3	7.389.900	3	7.759.395	3	8.147.365	3	8.554.733	3	8.982.470		
Tersedianya data bahan pangan pokok di Kabupaten	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	1	1	30.734.000	1	32.270.700	1	33.884.235	1	35.578.447	1	37.357.369		
2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)				30.734.000		32.270.700		33.884.235		35.578.447		37.357.369		
Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	1	1	30.734.000	1	32.270.700	1	33.884.235	1	35.578.447	1	37.357.369		
Tersedianya data ketersediaan pangan di daerah	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	0	4	640.017.250	4	672.018.113	4	705.619.018	4	740.899.969	4	777.944.967		
2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				640.017.250		672.018.113		705.619.018		740.899.969		777.944.967		
Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	0	4	640.017.250	4	672.018.113	4	705.619.018	4	740.899.969	4	777.944.967		
2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				289.039.600		303.491.580		318.666.160		334.599.467		351.329.440		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pemeliharaan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara (Ton)	31	31	23.144.600	31	24.301.830	31	25.516.922	31	26.792.768	31	28.132.406		
2.09.03.2.02.0006 - Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota				23.144.600		24.301.830		25.516.922		26.792.768		28.132.406		
Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara (Ton)	31	31	23.144.600	31	24.301.830	31	25.516.922	31	26.792.768	31	28.132.406		
Terlaksananya pengadaan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	21	15	265.895.000	15	279.189.750	15	293.149.238	15	307.806.699	15	323.197.034		
2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				265.895.000		279.189.750		293.149.238		307.806.699		323.197.034		
Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	21	15	265.895.000	15	279.189.750	15	293.149.238	15	307.806.699	15	323.197.034		
Terlaksananya pengisian stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)				0		0		0		0		0		
Terlaksananya penyaluran stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)				0		0		0		0		0		
Terlaksana nya refreshing Stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)				0		0		0		0		0		
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				161.960.300		170.058.315		178.561.231		187.489.293		196.863.757		
Menurunnya daerah rawan pangan	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani (%)	12,5	15	161.960.300	15	170.058.315	15	178.561.231	15	187.489.293	15	196.863.757	2.09.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Ketahanan Pangan	
2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				56.148.000		58.955.400		61.903.170		64.998.329		68.248.245		
Meningkatnya SDM pengolah data identifikasi daerah rawan pangan yang kompeten	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)	2	2	56.148.000	2	58.955.400	2	61.903.170	2	64.998.329	2	68.248.245		
2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan				56.148.000		58.955.400		61.903.170		64.998.329		68.248.245		
Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)	2	2	56.148.000	2	58.955.400	2	61.903.170	2	64.998.329	2	68.248.245		
Tersedianya data daerah rawan pangan pada perangkat daerah yang terkait				0		0		0		0		0		
2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				105.812.300		111.102.915		116.658.061		122.490.964		128.615.512		
Memenuhi kebutuhan pangan keluarga di daerah rawan pangan				0		0		0		0		0		
Meningkatnya identifikasi terhadap daerah rawan pangan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	2	2	66.550.300	2	69.877.815	2	73.371.706	2	77.040.291	2	80.892.306		
2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				66.550.300		69.877.815		73.371.706		77.040.291		80.892.306		
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	2	2	66.550.300	2	69.877.815	2	73.371.706	2	77.040.291	2	80.892.306		
Monitoring dan evaluasi terhadap bantuan yang telah diberikan				0		0		0		0		0		
Pemberian bantuan bibit ternak, sayur dan pupuk				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sosialisasi / penyuluhan budidaya bantuan yang diberikan kepada calon penerima bantuan				0		0		0		0		0		
Terlaksananya penyaluran bantuan beras, bahan pangan pokok kepada keluarga miskin di daerah rawan pangan	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	39.262.000	1	41.225.100	1	43.286.355	1	45.450.673	1	47.723.206		
2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				39.262.000		41.225.100		43.286.355		45.450.673		47.723.206		
Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	39.262.000	1	41.225.100	1	43.286.355	1	45.450.673	1	47.723.206		
Tersalurnya bantuan beras kepada keluarga miskin				0		0		0		0		0		
Tersedianya data KK penerima bantuan sosial				0		0		0		0		0		
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				238.361.718		238.361.718		238.361.718		238.361.718		238.361.718		
Meningkatnya pengawasan keamanan pangan daerah	Persentase pengawasan pangan daerah yang dilaksanakan sesuai aturan (%)	100	100	238.361.718	100	238.361.718	100	238.361.718	100	238.361.718	100	238.361.718	2.09.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Ketahanan Pangan	
2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				238.361.718		238.361.718		238.361.718		238.361.718		238.361.718		
Meningkatnya jumlah SDM yang kompeten dalam pengambilan sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
2.09.05.2.01.0009 - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
Meningkatnya keikutsertaan Bimbingan Teknis Petugas Pengambil Contoh Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
2.09.05.2.01.0008 - Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
Meningkatnya pengambilan dan pengujian jenis sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan untuk keamanan pangan di daerah	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	5	5	198.361.718	5	198.361.718	5	198.361.718	5	198.361.718	5	198.361.718		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				198.361.718		198.361.718		198.361.718		198.361.718		198.361.718		
Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	5	5	198.361.718	5	198.361.718	5	198.361.718	5	198.361.718	5	198.361.718		
Terlaksananya monitoring keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
Terlaksananya pengujian keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
2.09.05.2.01.0006 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan				
1.	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai <u>Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</u>	
			2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	
2.	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
		Meningkatnya diversifikasi pangan	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
		Meningkatnya stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	2.09.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	
		Meningkatnya diversifikasi pangan	2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
		Meningkatnya stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
			2.09.03.2.01.0010 - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	
			2.09.03.2.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	
			2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
			2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
			2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			2.09.03.2.02.0006 - Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	
		Meningkatnya diversifikasi pangan	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai <u>dengan Angka Kecukupan Gizi</u>	
			2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	
			2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
3.	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Menurunnya daerah rawan pangan	2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
			2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	
			2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
4.	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya pengawasan keamanan pangan daerah	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
			2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.09.05.2.01.0006 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	
			2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.09.05.2.01.0008 - Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.09.05.2.01.0009 - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan									
2.	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	93,21	93	93	94	94	95	96	
3.	Persentase Bahan Pangan Yang Aman Beredar Di Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	81,95	83	84	85	86	87	88	
5.	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Poin	78	80	81	82	83	84	85	
6.	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	91,25	93	93	94	94	95	96	
7.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	81,95	83	84	85	86	87	88	
8.	Nilai SAKIP perangkat daerah	Skor	81,95	83	84	85	86	87	88	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
2.	Skor Pola Pangan Harapan	positif	Nilai	91,25	93	93	94	94	95	96	
3.	Persentase Bahan Pangan Yang Aman Beredar Di Masyarakat	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan Beras/Jagung sesuai kebutuhan)	positif	%	0,56	0,6	0,65	0,7	0,75	0,8	0,8	

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis dan Operasional OPD

Nama Pemda Nama OPD Periode yang dinilai Tujuan Strategis		: Pemerintah Kabupaten Tapin : Dinas Ketahanan Pangan : 2025 : Meningkatnya Kemandirian Pangan Daerah								
Sasaran strategis OPD		: Meningkatkan Kualitas Ketahanan dan Keamanan Pangan Daerah								
No	Penetapan Konteks			Proses Bisnis/Tahap	Kode Risiko	Risiko		Sebab ^{*)}		Dampak ^{**)}
	Sastra/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran/Tujuan	Indikator			Pernyataan Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	SASTRA PEMDA - Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Ketahanan Pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Penyusun Kebijakan	SR.DKP.01	Validasi dan finalisasi data yang berkembang cepat	Kepala Dinas	Pemrosesan informasi yang lambat	Internal	Memperlambat arus laju kegiatan yang terhubung
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Diversifikasi Pangan	Persentase Kenaikan Konsumsi Bahan Pangan non beras / Terigu				Kepala Bidang Ketersediaan Distribusi Pangan			
		Meningkatnya Stok Cadangan Pangan Pemerintah	Persentase Stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)				Kepala Bidang Ketersediaan Distribusi Pangan			
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Meningkatnya Pemanfaatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Persentase Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang di manfaatkan	Pemantauan			Analisis Ketahanan Pangan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan			
		Terlaksananya Pembinaan Pemanfaatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Persentase Lumbung Pangan yang kembali beroperasi	Pelaksanaan			Analisis Ketahanan Pangan di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan			
		Tersedianya Data Ketersediaan pangan di Daerah	Persentase Data Ketersediaan Pangan di Daerah yang Valid	Pelaksanaan			Analisis Ketahanan Pangan di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan			
		Optimalnya Informasi Harga Pangan ke Masyarakat	Persentase Informasi Harga Pangan yang Rutin	Pelaksanaan			Analisis Ketahanan Pangan di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan			
		Terlaksananya Koordinasi dengan perangkat daerah Lain	Persentase Data Bahan Pangan Pokok yang di Penuhi	Pelaksanaan			Analisis Ketahanan Pangan di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan			
		Meningkatnya Kelompok Wanita Tani yang Memanfaatkan Lahan Pekerjaan Sebagai Penyedia Pangan	Persentase Kelompok Wanita Tani yang Memanfaatkan Lahan Pekerjaan	Pelaksanaan			Analisis Ketahanan Pangan di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan			
		Terlaksananya Sosialisasi Diversifikasi Pangan	Persentase Sosialisasi Diversifikasi Pangan Yang Lulus Passing Grade	Pelaksanaan			Analisis Ketahanan Pangan di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan			
		Terlaksananya Penyuluhan dan Pelatihan Pola Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Persentase Kader yang lulus Post Test	Pelaksanaan			Analisis Ketahanan Pangan di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan			
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Pemantauan	OR.DKP.01	Data Neraca Bahan Makanan Tidak Tersusun Tepat Waktu	Analisis Ketahanan Pangan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Data Tidak Tersedia Tepat Waktu	Eksternal	Analisa Neraca Bahan Makanan tidak dilaksanakan Tepat Waktu
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Pelaksanaan	OR.DKP.02	Konsumsi Pangan masih belum memenuhi kaidah B2SA	Analisis Ketahanan Pangan di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Rendahnya Konsumsi masyarakat terhadap pangan lokal	Eksternal	Bahan pangan berbasis sumber daya lokal tidak dimanfaatkan dengan baik
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Pelaksanaan	OR.DKP.03	Data Tidak tersedia tepat waktu	Analisis Ketahanan Pangan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Kurang Tenaga Untuk Melaksanakan Survei	Internal	Hasil Survei arus bahan pangan tidak tersedia tepat waktu
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pelaksanaan	OR.DKP.04	Data Tidak tersedia tepat waktu	Analisis Ketahanan Pangan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Kurang Tenaga Untuk Melaksanakan Pengumpulan Data	Internal	Data Laporan Informasi Pasokan, Harga Pangan dan Akses Pangan di Daerah tidak tersedia Tepat Waktu
	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Berkembangnya Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Pelaksanaan	OR.DKP.05	Data Tidak Tersedia	Analisis Ketahanan Pangan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	aktifitas Gapoktan berjalan Pasif	Eksternal	Data tidak Tersedia

Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Persentase Pengadaan yang Menghasilkan Stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sesuai dengan Aturan	Pembinaan			Analisis Ketahanan Pangan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan			
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Pelaksanaan	OR.DKP.06	1. Penurunan Kualitas Cadangan Pangan 2. Penetapan Jenis dan Jumlah Cadangan Pangan tidak Sesuai dengan Kebutuhan	1. Analisis Ketahanan Pangan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	1. Cadangan Pangan Berupa Gabah Mempunyai Umur Teknis Pendek 2. Penetapan Jenis Jumlah dan Cadangan Pangan tidak Memperhatika Kondisi Kebutuhan Konsumsi Masyarakat Setempat dan Jumlah Kebutuhan	Internal	1. Kurangnya Kualitas Cadangan Pangan 2. Pengadaan Cadangan Pangan Tidak Sesuai Dengan Perencanaan
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Pelaksanaan	OR.DKP.12	1. Penurunan Kualitas Cadangan Pangan 2. Penetapan Jenis dan Jumlah Cadangan Pangan tidak Sesuai dengan Kebutuhan	1. Analisis Ketahanan Pangan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	1. Cadangan Pangan Berupa Gabah Mempunyai Umur Teknis Pendek 2. Penetapan Jenis Jumlah dan Cadangan Pangan tidak Memperhatika Kondisi Kebutuhan Konsumsi Masyarakat Setempat dan Jumlah Kebutuhan	Internal	1. Kurangnya Kualitas Cadangan Pangan 2. Pengadaan Cadangan Pangan Tidak Sesuai Dengan Perencanaan
Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tersalurinya Benih atau Bibit Tanaman Sayur	Persentase Kelompok Wanita Tani yang Memanfaatkan Benih atau Bibit Tanaman Sayur	Pelaksanaan			Analisis Ketahanan Pangan di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan			
	Terlaksananya Pemantauan dan Peninjauan Lahan Pekarangan Sebagai Penyedia Pangan	Persentase Pemantauan dan Peninjauan Lahan Pekarangan Sebagai penyedia Pangan	Pelaksanaan			Analisis Ketahanan Pangan di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan			
	Tersalurinya Bantuan Benih atau Bibit Tanaman Sayur Kepada Keluarga Balita Stunting	Persentase keluarga Balita Stunting yang Menerima Benih atau Bibit Tanaman sayur	Pelaksanaan			Analisis Ketahanan Pangan di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan			
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Pelaksanaan	OR.DKP.07	Penurunan Kualitas dan Kuantitas Terhadap Konsumsi Protein dan energi	Analisis Ketahanan Pangan di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kualitas dan kuantitas konsumsi	Eksternal	Konsumsi Pangan Masyarakat per kapita pertahun tidak memenuhi target
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pelaksanaan	OR.DKP.08	Tidak Maksimalnya Keberlanjutan Kegiatan	Analisis Ketahanan Pangan di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Motivasi Untuk melanjutkan kegiatan menurun	Eksternal	Kegiatan tidak berkelanjutan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Menurunnya Daerah Rawan Pangan	persentase daerah rawan pangan yang tertangani				Kepala Bidang Ketersediaan Distribusi Pangan			
Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersalurinya bantuan Beras Keluarga Miskin Ekstrim	Persentase KK Miskin Ekstrim yang Menerima Bantuan	Pembinaan			Analisis Ketahanan Pangan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan			
	Penanganan Stunting dalam Bidang Ketahanan Pangan lebih Optimal	Persentase Keluarga Balita Stunting yang diintervensi	Pembinaan			Analisis Ketahanan Pangan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan			
	Tersalurinya Bantuan Sembako Kepada Keluarga Balita Stunting	Persentase Keluarga Balita Stunting yang Menerima Bantuan Sembako	Pembinaan			Analisis Ketahanan Pangan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan			
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Pelaporan dan Evaluasi	OR.DKP.09	Data Penyusunan Peta Tidak Tersedia Tepat Waktu	Analisis Ketahanan Pangan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Kategori data yang diminta tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku	Eksternal	Peta Ketahanan dan Kerentanan tidak Tersedia Tepat Waktu

Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Teridentifikasi Daerah Rawan Pangan	Persentase Desa Rawan Pangan yang Teridentifikasi	Pemantauan				Analisis Ketahanan Pangan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan			
	Tersedianya SDM Pengolahan Data Identifikasi Daerah Rawan Pangan yang Kompeten	Persentase SDM Pengolah data Identifikasi Daerah Rawan Pangan yang Kompeten	Pemantauan				Analisis Ketahanan Pangan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan			
	Tersedianya Data Daerah Rawan Pangan pada Perangkat Daerah yang Terkait	Persentase Data Daerah Rawan Pangan pada Perangkat Daerah yang Lengkap	Pemantauan				Analisis Ketahanan Pangan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan			
	Terlaksananya Penyaluran Bantuan Sosial	Persentase KK Penerima Bantuan Sosial yang teridentifikasi Daerah Rawan Pangan	Pemantauan				Analisis Ketahanan Pangan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan			
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	OR.DKP.10	Hibah Ternak Tidak Berkembang Biak dengan baik	Analisis Ketahanan Pangan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Minimnya pengetahuan budidaya ternak penerima hibah	Eksternal		Penanganan kerawanan pangan tidak maksimal
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	meningkatkan Keragaman mutu dan Keamanan Pangan	persentase Penanganan Keamanan Pangan Segar				Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan				
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengujian Jenis Sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan Untuk Keamanan Pangan Daerah	Persentase Peningkatan Sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan untuk Keamanan Pangan di Daerah yang Berada pada Pasar Induk yang Diuji	Pemantauan			Analisis Ketahanan Pangan di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan				
	Terlaksananya Pengujian Jenis Sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan pada Laboratorium yang Berstandar	Persentase Jenis Sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Lulus Uji pada Laboratorium yang Berstandar	Pemantauan			Analisis Ketahanan Pangan di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan				
	Tersedianya SDM yang Berkompetensi dan Bersertifikasi untuk Pengambilan Sampel Pangan Segar	Persentase SDM Pengambilan Sampel Pangan Segar yang Bersertifikat	Pemantauan			Analisis Ketahanan Pangan di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan				
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	OR.DKP.11	Mutu dan Keamanan Pangan tidak Diperhatikan	Analisis Ketahanan Pangan di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kurangnya pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat terhadap pentingnya mutu dan keamanan pangan yang dikonsumsi	Eksternal		Masih ditemukannya Produk Pangan yang berbahaya
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Terlaksananya	Jumlah Dokumen Kajian Kawasan Berpotensi Bencana Dan Mitigasinya Di KabupatenTanah Laut	Pelaksanaan	ROO.Disperkim.01	1. gagal Lelang	Kepala Bidang/Kepala Seksi	1. tidak adanya yang menawar	Eksternal	1. Barang yang diperlukan tidak didapatkan
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomidan Pembangunan									
2	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Terlaksananya	Jumlah Dokumen Masterplan Tata Letak Tempat Penampungan Sementara (TPS)Persampahan di Kabupaten Tanah Laut	Pelaksanaan	ROO.Disperkim.02	1. gagal Lelang 2. hasil tidak sesuai harapan	Kepala Bidang/Kepala Seksi	Tidak Mendapatkan Penyedia yang sesuai	Eksternal/Internal	Hasil Yang tidak maksimal/tidak sesuai
3	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Terlaksananya	Jumlah Dokumen Grand Design Penataan Kota Pelahari	Pelaksanaan	ROO.Disperkim.03	1. gagal Lelang 2. hasil tidak sesuai harapan	Kepala Bidang/Kepala Seksi	Tidak Mendapatkan Penyedia yang sesuai	Eksternal/Internal	Hasil Yang tidak maksimal/tidak sesuai

Keterangan :

Kolom e diisi dengan Tahap/Proses Bisnis (Penyusunan Kebijakan/SOP,Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi, Pemantauan, dan lainlain)

Kolom g diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko (Kriteria Risiko walib memenuhi 3 hal yakni : Peristiwa, Kemungkinan, dampak negatif terhadap pencapain tujuan)
Contoh : Kegiatan melaksanakan absen pagi sesuai peraturan disiplin pegawai, Tujuan datang tepat waktu ke kantor,

1.Datang tidak tepat waktu ke kantor 2.Tidak dapat absen pagi tepat waktu 3.Menggunakan seragam korpri pada hari senin, sesuai aturan putih	Uraian Kalimat Risiko yang kurang tepat	negasi kalimat tujuan negasi kalimat kegiatan tidak sambung dgn kegiatan	Uraian Kalimat Risiko yang tepat
			1. Ban bocor di tengah jalan 2. Bensin habis di tengah jalan 3. Tidak lengkap surat kendaraan saat ada pemeriksaan 4. Mesin mogok di tengah jalan 5. Lambatnya proses mengantarkan anak ke sekolah

Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom h diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
Contoh : Bidang atau bagian untuk Operasional, Kepala OPD untuk Strategis

Kolom i diisi dengan uraian penyebab timbulnya risiko.

Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material

Uraian Kalimat Risiko yang tepat		Sebab	Aspek
1. Ban bocor di tengah jalan 2. Bensin habis di tengah jalan 3. Tidak lengkap surat kendaraan saat ada pemeriksaan 4. Mesin mogok di tengah jalan 5. Lambannya proses mengantarkan anak ke sekolah		Lupa mengecek angin ban / kulit ban sudah aus	Man / Material
		Lupa mengecek indikator bensin	Man
		Lupa memasukkan SIM dan STNK ke dompet	Man
		Lupa ganti oli / usia mesin sudah 8 tahun	Man / Machine
		Antrian panjang kendaraan Ortu pengantar	Method

Kolom j diisi dengan sumber risiko (eksterna/internal)

Uraian Kalimat Risiko yang tepat		Sumber Risiko
1. Ban bocor di tengah jalan 2. Bensin habis di tengah jalan 3. Tidak lengkap surat kendaraan saat ada pemeriksaan 4. Mesin mogok di tengah jalan 5. Lambannya proses mengantarkan anak ke sekolah		Eksternal
		Internal
		Internal
		Internal
		Eksternal

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi.

Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum



PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPD				
Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Tapin		
Periode yang dinilai		: 2025		
OPD yang Dinilai		: Dinas Ketahanan Pangan		
Pemilik Risiko		: Kepala Dinas (Strategis) dan Kepala Bidang/Seksi (Operasional)		
Sumber Data		: Renstra, Renja, Pokin, dan lain lain		
Tujuan Strategis		: Meningkatnya Kemandirian Pangan Daerah		
Sasaran Strategis		1 .Meningkatkan Kualitas Ketahanan dan Keamanan Pangan Daerah		
IKU Strategis	Uraian Indikator			Satuan
	1. Skor Pola Pangan Harapan	Susunan Pangan yang beragam berdasarkan total energy ketersediaan atau konsumsi yang mencukupi kebutuhan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa		Poin
	2. Persentase Bahan Pangan yang Aman beredar di masyarakat	Memastikan bahwa pangan yang beredar aman dan tidak berbahaya bagi kesehatan masyarakat		Persen
Nama Program dan Kegiatan Utama	A.PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT A.1 Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan A.1.1. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan A.1.2. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal A.1.3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya A.1.4. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan A.1.5. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan A.2 Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota A.2.1. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota A.3 Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi A.3.1. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun A.3.2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal B. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN B.1. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan B.1.1. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan B.2. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota B.2.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota C. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN C.1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota C.1.1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			
	Uraian Indikator Keluaran			
Keluaran/Hasil Sub Kegiatan	A. Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan			Persentase
	A.1. Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah			Persentase
	A.1.1. Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan			Laporan
	A.1.2. Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia			Laporan
	A.1.3. Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya			Laporan
	A.1.4. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan			Dokumen
	A.1.5. Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan			unit
	A.2. Persentase ketersediaan / stok cadangan pangan daerah yang tersedia			Persentase
	A.2.1. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara			Ton
	A.3. Persentase Peningkatan konsumsi sayur dan buah			Persentase
	A.3.1. Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun			Dokumen
	A.3.2. Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			Laporan
	B. Persentase daerah rawan pangan yang tertangani			Persentase
	B.1. Persentase Hasil analisa peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan yang disusun			Persentase
	B.1.1. Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan			Dokumen
	B.2. Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			Persentase
	B.2.1. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota			Laporan
	C. Persentase Skor Sampel Pangan Segar yang Lulus Uji			Persentase
	C.1. Persentase bahan pangan segar yang diujikan			Persentase
	C.1.1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			Dokumen
				Rantau, 6 Januari 2025 Kepala Dinas Ketahanan Pangan  RYZA RAMADIE, SE Pembina Utama Muda/ Ivb NIP. 19740315 200003 1 004

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Tapin								
Tahun Penilaian		: 2025								
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Kualitas Ketahanan dan Keamanan Pangan Daerah								
Urusan Pemerintahan		: Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Validasi dan finalisasi data yang berkembang cepat	SR.DKP.01		Pemrosesan informasi yang lambat	memperlambat arus laju kegiatan yang terhubung	-	Membentuk Tim kerja dan menyusun jadwal skema alur kerja			
2	Data Neraca Bahan Makanan Tidak Tersusun Tepat Waktu	OR.DKP.01		Data Tidak tersedia tepat waktu	Analisis Neraca Bahan Makanan tidak dilaksanakan tepat waktu		Membentuk Tim kerja dan menyusun jadwal skema alur kerja			
3	Konsumsi Pangan masih belum memenuhi kaidah B2SA	OR.DKP.02		Rendahnya Konsumsi masyarakat terhadap pangan lokal	Bahan Pangan berbasis sumber daya lokal tidak dimanfaatkan dengan baik		terus giat melakukan Sosialisasi, Pelatihan/Pembinaan dan Promosi (Lomba Menu B2SA)			
4	Data Tidak tersedia tepat waktu	OR.DKP.03		Kurang Tenaga Untuk Melaksanakan Survei	Hasil survei arus bahan pangan tidak tersedia tepat waktu		Membentuk Tim kerja dan menyusun jadwal skema alur kerja			
5	Data Tidak tersedia tepat waktu	OR.DKP.04		Kurang Tenaga Untuk Melaksanakan Pengumpulan Data	Data Laporan Informasi Pasokan, Harga Pangan dan Akses Pangan di Daerah tidak tersedia Tepat Waktu		Membentuk Tim kerja dan menyusun jadwal skema alur kerja			
6	Data Tidak Tersedia	OR.DKP.05		Aktifitas Ga[oktan berjalan pasif	Data Tidak Tersedia		Terus giat melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap gapoktan			
7	1. Penurunan Kualitas Cadangan Pangan 2. Penetapan Jenis dan Jumlah Cadangan Pangan tidak Sesuai dengan Kebutuhan	OR.DKP.06		1. Cadangan Pangan gabah mempunyai umur teknis pendek 2. Penetapan Jenis jumlah dan Cadangan Pangan tidak memperhatikan kondisi kebutuhan konsumsi masyarakat setempat	1. Kurangnya Kualitas Cadangan Pangan 2. Pengadaan Cadangan Pangan Tidak Sesuai Dengan Perencanaan		Diadakannya refreshing cadangan gabah setiap tahun			
8	Penurunan Kualitas dan Kuantitas Terhadap Konsumsi Protein dan energi	OR.DKP.07		Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kualitas dan kuantitas konsumsi	Konsumsi Pangan Masyarakat per kapita pertahun tidak memenuhi target		terus giat melakukan Sosialisasi, Pelatihan/Pembinaan dan Promosi			
9	Tidak Maksimalnya Keberlanjutan Kegiatan	OR.DKP.08		Motivasi Untuk melanjutkan kegiatan menurun	Kegiatan tidak berkelanjutan		terus giat melakukan Sosialisasi, Pelatihan/Pembinaan dan Promosi			

10	Data Penyusunan Peta Tidak Tersedia Tepat Waktu	OR.DKP.09		Kategori data yang diminta tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku	Peta Ketahanan dan Kerentanan tidak Tersedia Tepat Waktu		Membentuk Tim kerja dan menyusun jadwal			
11	Hibah Ternak Tidak Berkembang Biak dengan baik	OR.DKP.10		Minimnya pengetahuan budidaya ternak penerima hibah	Penanganan kerawanan pangan tidak maksimal		Membentuk Tim kerja dan menyusun jadwal			
12	Mutu dan Keamanan Pangan tidak Diperhatikan	OR.DKP.11		Kurangnya pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat terhadap pentingnya mutu	Masih ditemukan produk pangan yang berbahaya		Diperlukannya Laboratorium untuk pengambilan sampel di Kabupaten untuk mempermudah proses pemeriksaan sampel pangan			
13	1. Penurunan Kualitas Cadangan Pangan 2. Penetapan Jenis dan Jumlah Cadangan Pangan tidak Sesuai dengan Kebutuhan	OR.DKP.12		1. Cadangan Pangan Berupa Gabah Mempunyai Umur Teknis Pendek 2. Penetapan Jenis Jumlah dan Cadangan Pangan tidak Memperhatika Kondisi Kebutuhan Konsumsi Masyarakat Setempat dan Jumlah Kebutuhan	1. Kurangnya Kualitas Cadangan Pangan 2. Pengadaan Cadangan Pangan Tidak Sesuai Dengan Perencanaan		Diadakannya refreshing cadangan gabah setiap tahun			

Rantau, 06 Januari 2025

Kepala Dinas



RYZA RAMADIE, SE
Pembina Utama Muda/ lvb
NIP. 19740315 200003 1 004